

# TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU  
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000  
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)

www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066  
e-mail : redaksi@sinartani.co.id

www.sinartani.co.id

Edisi 15 - 21 Januari 2025

No. 4070  
Tahun LV



8 Langkah Cepat Kementan Kendalikan PMK

10 Erni, Mentereng Berkat Cireng

12 Cabut Izin Distributor Pupuk Nakal



www.sinartani.co.id

tabloidsinartani.com

@SinarTaniST

tabloidsinartani

SINTA TV

FDK An Agricultural Company

# BoomFlower<sup>®</sup> BOOMBASTIS



### Akselerator Tanaman

- ✓ Mempercepat penyerapan unsur hara,
- ✓ Mempercepat adaptasi dan pemulihan tanaman,
- ✓ Mempercepat pertumbuhan, pembungaan dan pematangan tanaman.



## EDITORIAL

## Berita Hangat Diawal Tahun

**D**i awal tahun, banyak hal yang menjadi pembicaraan hangat di dunia pertanian. Dari mulai rencana pemerintah menarik penyuluh ke pusat, kemudian merebak kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) dan rencana kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Wacana mengembalikan penyuluh pertanian di daerah ke pusat menjadi kebingungan tersendiri bagi kalangan penyuluh pertanian. Apalagi pemerintah saat ini tengah mempersiapkan regulasinya. Ada peluang, ada juga tantangan ketika penyuluh kembali ditangani pemerintah pusat.

Sebagai sebuah media lahir bersamaan penyuluh pertanian membuat Tabloid Sinar Tani tergerak menggelar webinar mengenai rencana pemerintah tersebut. Banyak pertanyaan yang masuk, baik melalui chat zoom maupun chat di youtube SINTATV. Pertanyaan paling banyak mengenai ketenagakerjaan dan kelembagaan ketika mereka ditarik ke pusat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil webinar, kami mengupas dalam SOROTAN minggu ini. Sejauh mana urgensi penarikan penyuluh pertanian ke pusat, rancangan kebijakan dan bagaimana Kementerian Pertanian menyiapkan regulasi ketika penyuluh pertanian sudah di pusat. Kami juga mengungkap suara hati penyuluh pertanian dalam rubrik Geliat Penyuluh.

Hal lain yang menjadi bahasan dalam terbitan Sinar Tani minggu ini adalah merebak kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa sentra produksi ternak. Puluhan ternak sapi telah banyak terpapar dan mati akibat serangan penyakit zoonis tersebut. Sejauh mana upaya pemerintah menangkak penyebaran PMK melalui vaksinasi.

Serangan PMK ini tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya bagi peternak,eliharaan mereka itu adalah bagian dari investasi, bahkan ATM. Jika sedang membutuhkan uang, maka ternak tersebut menjadi harta yang paling mudah dijual. Kasus PMK ini sudah selayaknya menjadi perhatian utama pemerintah.

Minggu ini Tabloid Sinar Tani juga menyoroti rencana kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah per 15 Januari menjadi Rp 6.500/kg dari sebelumnya HPP gabah Rp 6.000/kg. Kenaikan HPP gabah menjelang musim panen memang menjadi kado bagi petani menjelang musim panen tiba. Salah satu harapannya, kenaikan HPP gabah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.

Satu lagi yang kini tengah menjadi pembicaraan hangat adalah penyaluran pupuk subsidi yang sudah bisa diterima petani mulai 1 Januari 2025. Pemerintah telah membuat kebijakan pemangkasan jalur distribusi pupuk subsidi. Dengan modal KTP, petani bisa langsung menebus pupuk subsidi agar bisa tepat waktu, harga dan jumlah. Tapi di lapangan ternyata ada petani yang menebus pupuk subsidi jauh diatas harga ketetapan pemerintah.

Kami berharap informasi yang kami sajikan memberikan manfaat besar bagi pembaca, khususnya petani dan penyuluh pertanian di Indonesia.

## SAUNG TANI

**Pemerintah naikan HPP gabah di petani per 15 Januari**

- Konsumen: asal harga beras jangan naik juga

**PMK merebak lagi di beberapa daerah**

- Waspada! Waspada!

**Mentan: cabut ijin distributor pupuk nakal**

- Jangan coba main-main sama petani



**Andi Amran Sulaiman**  
Menteri Pertanian RI

## Cabut Ijin Distributor Pupuk Nakal

**B**aru-baru ini kami menerima keluhan petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait penjualan pupuk subsidi yang harganya mencapai Rp 300 ribu per kuintal atau melebihi harga eceran tertinggi (HET). Kami juga mendapati keluhan petani di Kabupaten Bone terkait proses pendistribusian yang tidak sesuai HET.

Mengenai hal ini, nanti akan kami cek. Kalau benar di atas HET sudah pasti ditindaki. Kami akan cek alamatnya, orangnya siapa. Kami akan evaluasi dan bisa dicabut izinnya. Kami secara tegas mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi jika terjadi penyelewengan terkait pupuk di Indonesia.

Kondisi harga pupuk yang tinggi di NTB itu terungkap saat tanam raya padi varietas unggul Gajah Mada Gogo Rancah (Gamagora) 7 bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Desa Pengembur, Kecamatan Punjut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Senin 6 Januari 2025.

Kami sudah meminta PT Pupuk Indonesia untuk segera menelusuri masalah ini, dengan harapan petani tidak membeli pupuk di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi petani untuk menuju swasembada pangan selama ini salah satunya adalah persoalan pupuk.

Kami tegaskan, bahwa pemerintah di bawah komando tertinggi Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian luar biasa kepada sektor pertanian. Pemerintah akan bersikap keras kepada pihak yang menzalimi petani. Petani itu ujung tombak kita. Masa mau dizalimi dengan menaikkan harga (pupuk). Ini tidak boleh lagi terjadi.

Beberapa contoh langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) menindak penyelewengan. Salah satunya pada November 2024 lalu, Kementan mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan penyelewengan di sektor pertanian, khususnya terkait pupuk.

Seperti diketahui, persoalan pupuk menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo telah mengambil langkah strategis terkait pupuk. Salah satunya penambahan kuota pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton pada 2025.

Per 1 Januari 2025, pemerintah resmi menetapkan HET pupuk bersubsidi sebesar Rp 2.250 per kilogram (kg) untuk pupuk urea, pupuk NPK Rp 2.300 per kg, pupuk NPK untuk kakao Rp 3.300 per kg, serta pupuk organik Rp 800 per kg.

Selain itu, sejak 1 Januari 2025, sistem penyaluran pupuk telah disederhanakan dan langsung didistribusikan dari PT Pupuk Indonesia ke pengecer dan gabungan kelompok tani. Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani yang terdaftar e-RDCK juga dipermudah dengan menggunakan KTP. Jadi sistem distribusi pupuk telah diperbaiki agar lebih efisien dan langsung ke petani.

Tahun lalu penyaluran pupuk itu dilakukan secara berjenjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Namun sekarang ini pemerintah telah memangkas 145 terkait distribusi pupuk. Saat ini distribusi pupuk tersebut langsung disalurkan dari PT Pupuk Indonesia ke pengecer dan gapoktan.

Berbagai upaya ini dilakukan untuk mempermudah petani Indonesia dan mendongkrak produktivitas pangan nasional demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.



**PINDAI BARCODE!**  
Untuk Mengakses e-paper SinarTani.



Desain Cover: Budi Putra K.  
Foto Cover: Istimewa

**Pemimpin Umum/Penanggung Jawab :** Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter:** Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan :** Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari

**Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris:** DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; Ir. Achmad Saubari Prasodjo

**Direktur Utama:** DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS

**Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan:** Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205

**Email:** redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menper/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI 46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586; **Percetakan:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

# Jejaring Agribisnis Petani Buah, Solusi Cerdas Atasi Anjloknya Harga Panen

Harga panen buah sering anjlok? Jejaring agribisnis jadi solusi cerdas! Kolaborasi petani, teknologi, dan pasar kini hadir untuk mengubah tantangan jadi peluang, meningkatkan keuntungan maksimal!



**M**embangun masyarakat agribisnis pedesaan memerlukan petani yang tangguh, dan kelompok tani buah menjadi pelaku utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Agar kelompok tani bisa berkembang, perlu adanya pemberdayaan yang tepat. Pemberdayaan di sini berarti memberikan kemampuan kepada kelompok tani untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik dari dalam maupun luar, guna mencapai tujuan bersama.

Kelompok tani yang berdaya memiliki ciri khas: kemampuan untuk menciptakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Mereka tidak hanya mampu merespons perubahan yang terjadi, tetapi juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kelompok yang berdaya juga dapat membuat keputusan mandiri yang adil, memberikan kesempatan yang setara bagi anggotanya, serta memastikan pembagian hasil usaha yang merata. Fungsi kelompok sebagai tempat belajar, unit produksi, dan ruang kerjasama akan memberi

manfaat langsung bagi anggota.

Kunci keberhasilan kelompok tani yang berdaya adalah kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan, menghasilkan perubahan positif yang tidak hanya berdampak pada mereka, tetapi juga pada masyarakat sekitar. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam membangun kelompok tani yang mandiri dan profesional.

Peningkatan kualitas SDM kelompok tani buah difokuskan pada peningkatan kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang efisien dan peningkatan produktivitas menjadi tujuan utama.

Kualitas pengembangan SDM ini dapat dicapai dengan meningkatkan wawasan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, keterampilan, serta semangat kerja yang disiplin dan profesional. Penekanan pada kewirausahaan, terutama dalam pemasaran, juga sangat penting.

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM kelompok tani buah antara lain dengan meningkatkan pendidikan

informal dan pelatihan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Pengembangan sekolah lapang dengan kurikulum terpadu yang sesuai dengan potensi wilayah dan kondisi sosial budaya juga menjadi langkah penting. Selain itu, kegiatan seperti magang, temu karya, temu usaha, anjang sana, dan pengembangan jejaring agribisnis akan memperkaya pengalaman serta memperluas peluang bagi kelompok tani dalam mencapai tujuannya.

## Pengembangan Jejaring Agribisnis

Pengembangan jejaring agribisnis pada kelompok tani buah menjadi kunci penting dalam membangun kemitraan usaha yang kokoh, berprinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan jaringan kelembagaan yang efektif dan efisien, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha tanaman buah melalui penguatan teknologi, sarana, prasarana, dan promosi.

Dalam pengembangan jejaring ini, kemampuan kelompok tani untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain sangat dibutuhkan. Kerjasama yang terjalin mulai dari tahap persiapan, penandatanganan perjanjian, hingga pemeliharaan hubungan merupakan proses yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip kerjasama.

Komunikasi timbal balik, kepercayaan, dan aturan tertulis menjadi landasan utama dalam memastikan hubungan yang harmonis antar pihak.

Negosiasi menjadi bagian penting dalam jejaring agribisnis. Proses ini melibatkan kemampuan tawar-menawar yang didukung oleh rasa percaya diri, pemahaman perilaku

manusia, dan komunikasi dua arah yang efektif.

Seorang negosiator yang baik harus mampu membaca situasi dan memahami tujuan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kesepakatan akhir dalam negosiasi biasanya dituangkan dalam kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan hubungan usaha yang profesional dan berkelanjutan.

## Penguatan Kelompok Tani

Peran kelembagaan sangat penting dalam membina kelompok tani buah. Kemitraan yang terjalin dapat memacu kerjasama antar anggota kelompok, serta antara kelompok tani dengan mitra usaha.

Beberapa langkah pembinaan meliputi pembentukan kelompok tani, pengembangan asosiasi atau gapoktan, pelaksanaan usaha bersama, serta peningkatan kemampuan manajerial dan kepemimpinan.

Melalui pembinaan yang terarah, kelompok tani dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien dan berkontribusi pada penguatan usaha agribisnis.

Selain itu, strategi hortikultura yang terintegrasi, mulai dari sistem perbenihan, produksi, hingga logistik, menjadi pilar penting untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan hortikultura sebagai penyangga perekonomian nasional.

Sebagai salah satu sektor utama pertanian, hortikultura memiliki potensi finansial besar. Penguatan jejaring agribisnis dan kerjasama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga kelompok tani, menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dengan pendekatan komprehensif, hortikultura dapat terus menjadi tumpuan bagi petani dan stakeholder, sekaligus memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan nasional.

Melalui pengembangan jejaring agribisnis, kelompok tani buah tidak hanya menjadi lebih mandiri dan profesional, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi komunitasnya.

**Penulis : Sumardi**  
Penyuluh Pertanian



## Malaysia Bangun Pabrik Sawit Berbasis AI

**V**isi Malaysia untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi global di bidang kelapa sawit dengan memperjuangkan praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan teknologi transformatif seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi robotik diawali dengan pembangunan pabrik kelapa sawit pintar berbasis AI yang pertama di dunia.

Didukung oleh platform andalan MyPalm yang menggabungkan sensor canggih, sistem kontrol berbasis AI, pemeliharaan prediktif, dan CCTV bertenaga AI untuk merevolusi operasional pabrik dan keberlanjutan. MyPalm menggabungkan sensor canggih untuk pemantauan parameter penting secara real-time dan CCTV bertenaga AI untuk melacak volume tandan buah segar dan meningkatkan kontrol kualitas.

Sistem kontrol berbasis AI mengotomatiskan proses dan memastikan kinerja optimal serta pemeliharaan prediktif, meminimalkan waktu henti, dan memaksimalkan efisiensi mesin. Selain itu Malaysia berkolaborasi dengan Fine Instrument Technology yang berbasis di Brasil untuk menghadirkan teknologi resonansi magnetik SpecFIT ke dalam MyPalm.

Integrasi ini meningkatkan ketertelusuran, presisi, dan efisiensi, memperkuat kemampuan untuk mengatasi tantangan industri dan memposisikan Malaysia sebagai pemimpin global dalam praktik minyak sawit berkelanjutan. Kita jangan sampai ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi AI di Industri sawit kita.

Malaysia saat ini memiliki 446 pabrik kelapa sawit, namun pabrik di Minsawi merupakan pabrik

pertama yang mengadopsi AI. Perangkat lunak baru ini mampu mengurangi ketergantungan tenaga kerja hingga 35 persen, sehingga menghasilkan penghematan besar bagi produsen.

Hampir 80 persen pekerja perkebunan di Malaysia adalah migran, sebagian besar berasal dari negara tetangga, Indonesia. Kebun sawit Malaysia banyak terdapat di Sabah yang merupakan wilayah penghasil minyak sawit terbesar di Negeri Jiran tersebut dengan pangsa pasar sebesar 24%.

Kedua, Sarawak, dengan pangsa pasar sebesar 21% terhadap produksi CPO di Malaysia. Ketiga, Pahang, adalah salah satu daerah penghasil minyak sawit yang signifikan di Malaysia dengan pangsa pasar sebesar 16%.

**Sumber : The Sun.my**

# Penyuluh Pertanian Ditarik ke Pusat

Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi yang akan mengatur penarikan penyuluh di daerah ke pusat. Ada peluang, ada juga tantangan ketika penyuluh kembali ditangani pemerintah pusat.

**B**erkaca dari pengalaman, Penyuluh Pertanian Utama, Dedi Nursyamsi menilai, SDM dalam hal ini penyuluh dan petani memberikan kontribusi sebesar 50 persen pada peningkatan produktivitas pertanian. Sedangkan inovasi teknologi dan sarpras 25%, begitu juga Peraturan Perundangan dan *local wisdom* 25%.

"Jadi percuma kalau pupuk, benih dan sarana produksi kita garap, tapi SDM-nya tidak kita garap. Bagaimana meningkatkan daya saing SDM? Ya dengan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan," kata Dedi saat webinar Peluang dan Tantangan Penyuluh Pertanian Ditarik ke Pusat yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Kamis (9/1).

Dedi mengakui, sejak UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penyuluh Pertanian di Pusat dialihkan ke Pemda, kemudian lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sektor pertanian menjadi pilihan, membuat persepsi daerah terhadap penyuluh pertanian beragam.

Terlihat dari Bakorluh/Bapeluh yang sebelumnya ada di daerah menjadi hilang, penyuluhan

pertanian di daerah tidak inline dengan program pusat. Selain itu, dukungan anggaran di daerah tidak memadai, kuantitas dan kualitas SDM penyuluh kurang.

Dampaknya penyuluhan pertanian menjadi tidak efektif. Kondisi tersebut membuat transfer teknologi tidak berjalan, pendampingan dan fasilitasi sarpras (pupuk, benih, alsintan, modal) kurang efektif, pelayanan penyuluhan pertanian juga tidak maksimal. "Kolaborasi juga menjadi lemah dan dampaknya produktivitas stagnan," ujarnya.

Karena itu, mantan Kepala BPPSDMP itu menegaskan, tidak ada cara lain adalah menggenjot penyuluhan. "Ingat SDM berkontribusi 50 persen terhadap peningkatan produksi. Programnya, Bimas atau apa namanya? Apalagi kita punya *lesson learn* pencapaian swasembada pangan tahun 1984," tuturnya.

Sementara itu, Lektor Kepala Polbangtan Bogor, Momon Rusmono mengatakan, peralihan kewenangan penyuluhan pertanian ke pemerintah pusat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah (cq Kementan) terhadap penyuluhan pertanian. "Saya senang penarikan penyuluh ke pusat," ujarnya.

Namun Momon mengingatkan, pengalihan wewenang penyuluh pertanian ke pusat bukan hanya ketenagakerjaan, tapi juga anggaran, kelembagaan, sarpras, penyelenggaraan, serta pembinaan dan pengawasan. "Jadi tidak hanya mengatur komponen ketenagaan penyuluh, tapi juga komponen lainnya," katanya.

Saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan kebijakan pemerintah (regulasi) yang mengatur peralihan kewenangan penyuluhan pertanian. Untuk jangka pendek, mantan Sekjen Kementerian Pertanian ini mengusulkan untuk menyusun Inpres tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan.

Namun Momon juga mengusulkan adanya amendemen UU 23 tahun 2014. Jika sebelumnya pertanian sebagai urusan pilihan menjadi pertanian dan pangan menjadi urusan wajib. Usulan lainnya adalah amendemen UU 16 tahun 2006, dengan menghilangkan penyuluhan perikanan dan kehutanan, khusus untuk sistem penyuluhan pertanian. "Keduanya perlu diperjuangkan agar sistem penyuluhan lebih ajeg," tegasnya.

## Susun Regulasi

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Purwanta mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun naskah kebijakan dan rancangan Peraturan Presiden tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang pertanian pada sub urusan penyuluhan pertanian.

"Usulan rancangan peraturan presiden oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Koordinator bidang Pangan telah disampaikan pada 26 November 2024 dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan," katanya.

Dalam beberapa kali rapat akhirnya usulan regulasi bukan dalam Perpres tapi Inpres. Setidaknya ada tiga substansi umum dalam

Inpres. Pertama, melaksanakan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui peran serta aktif dalam proses pengawasan dan pendampingan, diseminasi, dan transformasi modernisasi pertanian.

Kedua, merencanakan program dan anggaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam rangka pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. Ketiga, menyelesaikan permasalahan dalam pendayagunaan penyuluh pertanian guna mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

"Sedangkan substansi instruksi kepada Kementerian Pertanian adalah mengalihkan penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Pertanian," tuturnya.

Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Jawa Tengah, Warsana mengatakan, ketika penyuluh pertanian ditarik ke pusat ada beberapa tantangan yang bakal dihadapi. Pertama, proses seleksi untuk menjadi bagian dari pusat biasanya sangat ketat, membutuhkan kompetensi dan pengalaman yang tinggi.

Kedua, bekerja di pusat memerlukan pemahaman tentang dinamika birokrasi, administrasi yang kompleks, dan target yang lebih besar. Ketiga, jarak dari realitas lapangan dapat menyebabkan berkurangnya interaksi langsung dengan petani dan kondisi lapangan dapat membuat kebijakan yang dirumuskan kurang sesuai dengan kebutuhan nyata.

Keempat, target kerja di tingkat pusat sering kali lebih berat dengan tenggat waktu yang ketat dan tuntutan untuk menyelesaikan berbagai laporan serta analisis. Kelima, tantangan koordinasi.

"Dengan ditariknya penyuluh pertanian ke pusat, pemerintah harus mampu menjembatani kebijakan implementasi di daerah, yang memerlukan komunikasi dan koordinasi efektif dengan berbagai pihak," katanya. **Yul**



# Inilah Urgensi Penyuluhan Pertanian Kembali ke Pusat



Penyuluh pertanian memainkan peran krusial dalam sektor pertanian Indonesia. Meski tantangan desentralisasi kebijakan dan lemahnya lembaga penyuluhan menghambat kemajuan, ada peluang dengan pengelolaan kembali oleh pemerintah pusat.

Penyuluh pertanian memiliki peran sentral dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Namun, tantangan yang muncul dari desentralisasi kebijakan sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2014 telah menimbulkan banyak persoalan yang memengaruhi efektivitas penyuluhan di lapangan.

Kini, ada peluang baru dengan wacana pengelolaan penyuluh kembali diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun, peluang ini juga menghadirkan tantangan besar yang membutuhkan solusi strategis dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Penyuluh Pertanian Utama, Dedi Nursyamsi, menegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini penyuluh dan petani, memberikan kontribusi hingga 50% terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Sementara itu, inovasi teknologi, sarana-prasarana, serta peraturan perundangan masing-masing menyumbang 25%.

"Percuma saja jika kita fokus pada pupuk, benih, dan sarana produksi lainnya, tetapi SDM tidak diberdayakan. Kunci meningkatkan daya saing SDM adalah melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan intensif," kata Dedi dalam webinar bertema Peluang dan Tantangan Penyuluh Pertanian Ditarik ke Pusat yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Kamis (9/1).

### Pelemahan Peran Penyuluh

Dedi yang pernah menjabat Kepala BPPSDMP melihat sejak desentralisasi kebijakan, kelembagaan penyuluhan di daerah mengalami pelemahan signifikan. Lembaga seperti Bakorluh atau Bapeluh yang sebelumnya menjadi ujung tombak penyuluhan, kini tidak lagi berfungsi optimal.

Hal ini diperparah dengan dukungan anggaran daerah yang minim, serta kebijakan yang tidak selalu selaras dengan program pusat. "Dampak dari penyuluhan pertanian yang tidak efektif sangat terasa, terutama pada berbagai aspek kunci yang mendukung produktivitas sektor pertanian," katanya.

Salah satu dampak yang paling mencolok adalah stagnasi produktivitas. Dengan transfer teknologi yang terhambat, petani kesulitan mengakses inovasi terbaru.

Akibatnya, upaya meningkatkan hasil panen menjadi tidak optimal, dan produktivitas pertanian cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, minimnya dukungan terhadap sarana dan prasarana turut memperburuk keadaan. Penyediaan pupuk, benih unggul, alat mesin pertanian (alsintan), hingga akses modal menjadi kurang efektif tanpa pendampingan yang memadai dari penyuluh.

"Hal ini mengakibatkan banyak petani tidak mampu memanfaatkan teknologi atau fasilitas yang tersedia secara maksimal, sehingga peluang peningkatan efisiensi terlewatkan begitu saja," jelasnya.

Selain itu, kelembagaan penyuluhan di tingkat daerah juga mengalami pelemahan. Penghapusan Bakorluh/Bapeluh sebagai badan koordinasi

penyuluhan menyebabkan terputusnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Akibatnya, program-program yang dirancang di tingkat pusat tidak selaras dengan kebutuhan petani di lapangan, bahkan menciptakan kesenjangan yang signifikan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk penyuluhan pertanian. "Banyak penyuluh harus bekerja dengan sumber daya yang minim, sehingga efektivitas mereka dalam mendampingi petani pun sangat terbatas," tutur Dedi.

### Lesson Learn

Prof Dedi menguraikan, sebagai negara agraris, Indonesia pernah mencapai puncak keberhasilan dalam sektor pertanian pada tahun

1984 dengan swasembada beras. "Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran penyuluhan yang efektif melalui program seperti Bimbingan Massal (Bimas) dan Panca Usaha Tani," ujarnya.

Kala itu, komitmen pemerintah pusat sangat kuat. Presiden Soeharto bahkan menerima penghargaan dari FAO atas pencapaian swasembada beras. Kebijakan yang berpihak pada petani, didukung oleh sarana-prasarana yang memadai serta penyuluhan yang terkoordinasi dengan baik, menjadi kunci utama keberhasilan.

"Kita memiliki pelajaran penting dari swasembada 1984. Jika ingin mengulang keberhasilan ini, penyuluhan harus menjadi ujung tombak yang didukung penuh oleh kebijakan pemerintah pusat," kata Dedi. **Gsh/Yul**

## 5 Solusi Atasi Tantangan Penyuluhan

1. Penguatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan harus kembali menjadi prioritas utama dengan menarik para penyuluh ke pusat sehingga program-programnya dapat lebih terkoordinasi dan efektif. Pelatihan intensif, pendidikan, dan pendampingan bagi petani dan penyuluh perlu ditingkatkan agar mampu menghadirkan dampak yang nyata di lapangan.
2. Modernisasi sarana dan prasarana juga menjadi langkah penting. Pengadaan alat mesin pertanian, penyediaan benih unggul, penerapan sistem irigasi modern, dan distribusi pupuk yang merata harus menjadi fokus utama. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi tetapi juga mendorong produktivitas pertanian secara signifikan.
3. Reformasi kebijakan juga diperlukan untuk mendukung perbaikan penyuluhan. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi khusus, seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres), untuk menarik penyuluh kembali ke pusat. Dengan langkah ini, program penyuluhan dapat diselaraskan dengan visi nasional, memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat maksimal bagi petani.
4. Penguatan kelembagaan petani juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. Kelembagaan yang solid, seperti pembentukan korporasi petani, dapat membantu petani mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan pendampingan yang lebih baik.
5. Regenerasi petani perlu didorong melalui program-program inovatif seperti Brigade Pangan yang melibatkan petani milenial. Langkah ini dapat menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dan membantu memastikan keberlanjutan sektor ini di masa depan. **Gsh/Yul**

Lantas, bagaimana caranya untuk menggenjot Penyuluhan Pertanian? Prof. Dedi Nursyamsi mengatakan ada lima solusi utama yang harus segera diimplementasikan untuk mengatasi tantangan di sektor penyuluhan



4. Penguatan kelembagaan petani juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. Kelembagaan yang solid, seperti pembentukan korporasi petani, dapat membantu petani mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan pendampingan yang lebih baik.

# Rancangan Regulasi Kembalinya Penyuluh Pertanian ke Pusat

Pemerintah sudah berancang-ancang mengalihkan kewenangan penyuluh pertanian ke pusat. Saat ini, rumusan rancangan kebijakan yang mengatur proses peralihan tersebut telah dipersiapkan.



## MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA PENYULUHAN PERTANIAN



Salah satu langkah jangka pendek yang bisa diambil adalah penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan. Inpres ini diharapkan bisa menjadi pedoman yang jelas dan mengikat bagi pelaksanaan penyuluhan di tingkat pusat, serta memberikan arahan yang tepat bagi para penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Momon Rusmono, Lektor Kepala Polbangtan Bogor, mendukung rencana penarikan kewenangan penyuluhan pertanian ke pusat. Namun, ia menekankan perlunya regulasi yang mengatur anggaran, kelembagaan, dan pengawasan yang tepat.

"Saya menyambut baik keputusan pemerintah untuk menarik kembali kewenangan penyuluhan pertanian ke pusat," kata mantan Sekjen Kementerian Pertanian saat webinar Peluang dan Tantangan Penyuluh Pertanian Ditarik ke Pusat yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Kamis (9/1).

Namun, dibalik dukungan tersebut, Momon mengingatkan bahwaperalihan kewenangan ini tidak sekadar masalah ketenagakerjaan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek penting lain. Diantaranya, anggaran, kelembagaan, sarana dan

prasarana (saprass), penyelenggaraan, serta pembinaan dan pengawasan.

"Jadi, peralihan kewenangan ini tidak hanya mengatur komponen ketenagaan penyuluh, tetapi juga komponen lainnya yang mendukung sistem penyuluhan secara keseluruhan," katanya.

Peralihan kewenangan penyuluhan ke pemerintah pusat bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kesiapan infrastruktur, SDM penyuluh, hingga regulasi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan sektor pertanian.

Karena itu, pengalihan kewenangan ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan pertanian di lapangan. Selain itu, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait juga sangat penting untuk menciptakan sistem penyuluhan yang berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi sektor pertanian.

### Amandemen UU

Selain menyiapkan Inpres, dalam jangka panjang Momon mengusulkan adanya amandemen terhadap Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selama ini pertanian masih dianggap sebagai urusan pilihan dalam sistem pemerintahan daerah,

sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian dan prioritas terhadap sektor ini.

Dengan amandemen tersebut, Momon berharap agar pertanian dan pangan bisa diposisikan sebagai urusan wajib, sehingga bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan status urusan wajib, sektor pertanian akan lebih mudah mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih memadai.

Selain itu, Momon juga mengusulkan amandemen terhadap UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Diusulkan untuk menghilangkan penyuluhan perikanan dan kehutanan dari sistem penyuluhan pertanian. "Dengan amandemen ini sistem penyuluhan pertanian bisa lebih fokus dan lebih ajeg dalam mendukung sektor pertanian," katanya.

Dalam amandemen UU No. 16 Tahun 2006, salah satu yang Momon tekankan adalah kelembagaan penyuluh pertanian. Untuk di tingkat pusat memang sudah ada Badan Penyuluhan dan Pengembangann SDM Pertanian. Namun untuk tingkat daerah dari provinsi hingga kabupaten perlu dibentuk kelembagaan tersendiri.

Jika dalam UU No. 16 Tahun 2006, ditingkat provinsi ada Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian

dan dalam Perpres No 35 Tahun 2022 ada Satminkal, Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi, maka dalam rancangan regulasi yang baru perlu dibentuk Balai Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Pertanian Provinsi.

Begitu juga ditingkat kabupaten, Momon mengusulkan perlu dibentuk Balai Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Pertanian Kabupaten/Kota. "Di tingkat kabupaten perlu ada kelembagaan penyuluhan agar *span of control* terhadap penyuluh di lapangan lebih dekat, dan manajemen menjadi efisien baik koordinasi, update Simlulh dan data lapangan," katanya.

Sedangkan dalam rancangan kebijakan ketenagakerjaan, Momon mengusulkan, regulasi terbaru nanti harus menyebutkan penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ASN. Selain itu, pemetaan dan pendistribusian penyuluh ASN dan penyusunan standarisasi kompetensi tenaga penyuluh pertanian.

Sementara dalam penyelenggaraan penyuluhan, Momon mengatakan, perlu adanya regulasi yang menyebutkan mengenai pengembangan metode, mekanisme dan tata hubungan kerja penyuluhan pertanian. Kemudian pelaksanaan penyuluhan pertanian, koordinasi, penyeliaan, pengawasan, pengendalian serta pemantauan dan evaluasi.

"Selain itu regulasi bagaimana pelaksanaan kerja sama penyuluhan pertanian nasional, regional, dan internasional. Hal lainnya adalah mengenai pengembangan pangkalan data dan jaringan informasi Penyuluhan Pertanian," tuturnya.

Dengan sistem yang lebih terfokus pada penyuluhan pertanian, Momon berharap bisa menciptakan penyuluhan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat pencapaian target, seperti swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian.

Gsh/Yul

# Tindak Lanjut Inpres, Kementan Siapkan Langkah Aksi



Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, pemerintah menghadapi tantangan besar. Karena itu Plt Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Purwanta menegaskan, perlunya optimalisasi peran penyuluh sebagai garda terdepan dalam transformasi sektor pertanian.

“Penyuluh pertanian adalah kunci untuk mengawal transformasi dari pertanian tradisional menuju modern,” ujar Purwanta saat webinar Peluang dan Tantangan Penyuluh Pertanian Ditarik ke Pusat yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani di Jakarta, Kamis (9/1).

Seperti diketahui dalam program percepatan swasembada pangan, Kementerian Pertanian menyiapkan berbagai langkah strategis. Diantaranya, optimalisasi lahan (oplah), pencetakan sawah baru seluas 3 juta hektar (ha), revitalisasi sistem irigasi melalui pembangunan 61 bendungan, hingga pelibatan generasi milenial dan Gen Z dalam sektor pertanian. Namun, semua itu membutuhkan pendampingan intensif dari penyuluh pertanian untuk memastikan keberhasilannya.

Purwanta menjelaskan, bahwa tugas penyuluh tidak hanya mendampingi, tetapi juga memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, pompanisasi, dan optimalisasi lahan berjalan sesuai rencana. Sayangnya, di banyak daerah, dukungan terhadap penyuluh pertanian masih jauh dari optimal.

Keterbatasan jumlah penyuluh dibandingkan dengan kebutuhan desa yang memiliki potensi pertanian menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, struktur kelembagaan penyuluhan yang hanya berada di tingkat bidang, seksi, atau UPTD memperumit pelaksanaan program di lapangan. “Kita memerlukan satu komando dari pemerintah pusat agar penyuluhan bisa lebih terarah,” imbuhnya.

## Siapkan Inpres

Untuk optimalisasi penyuluh pertanian, pemerintah sudah berancang-ancang menarik penyuluh pertanian ke pusat. Berbagai rapat koordinasi telah digelar untuk membahas rancangan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pendayagunaan penyuluh pertanian. Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya penyuluh pertanian untuk mendukung percepatan swasembada pangan.

Substansi umum dari Inpres ini mencakup tugas penting, seperti melaksanakan pendampingan, pengawalan, dan transformasi modernisasi pertanian. Selain itu, program ini bertujuan merencanakan program dan anggaran penyuluhan untuk swasembada pangan serta menyelesaikan permasalahan struktural dalam pendayagunaan penyuluh pertanian.

Salah satu poin utama dalam rancangan Inpres adalah pengalihan penyuluh pertanian yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke Kementerian Pertanian. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini menghambat kinerja penyuluh di daerah.

“Peralihan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal penguatan kapasitas penyuluh dan pengembangan kebijakan nasional yang terintegrasi,” ujar Purwanta. Selain itu, Kementerian Pertanian juga akan bertanggung jawab dalam menyusun standar kompetensi penyuluh, mengembangkan kelembagaan petani, hingga menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas mereka.

Implementasi Inpres ini menurut Purwanta diperkirakan akan memengaruhi penganggaran nasional secara signifikan. Saat ini, terdapat sekitar 37.771 penyuluh, baik ASN maupun tenaga harian lepas, yang perlu diakomodasi. Karena itu, pemerintah harus memastikan anggaran yang memadai untuk mendukung kinerja penyuluhan, penyelenggaraan pelatihan, hingga penguatan kelembagaan.

## Langkah Aksi

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah aksi. Antara lain, penyusunan database penyuluh pertanian ASN dan tenaga harian lepas, pembuatan pedoman kinerja, standar kompetensi, dan formasi penyuluh. Selain itu, pengembangan sistem data petani dan penyuluh berbasis teknologi informasi juga menjadi prioritas.

Pemerintah juga akan menyusun buku saku penyuluh sebagai panduan praktis di lapangan akan disediakan untuk mendukung efektivitas kerja mereka. Langkah ini juga akan mencakup pengembangan metode dan tata laksana kerja yang efektif antara penyuluh dan berbagai pemangku kepentingan.

“Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, kita harapkan peran penyuluh dapat lebih terasa di seluruh wilayah Indonesia,” katanya. Untuk mendukung kerja di lapangan, lanjut Purwanta, pemerintah akan melengkapi penyuluh pertanian dengan alat-alat teknologi modern.

Di sisi lain, ungkap Purwanta, revitalisasi kelembagaan petani menjadi fokus utama. Dengan memperkuat kelembagaan petani, penyuluh pertanian dapat

berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan petani, memastikan berbagai program berjalan dengan efektif. “Penting bagi penyuluh untuk mendampingi petani tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga membantu membangun jaringan dan meningkatkan daya saing,” tambahnya.

Transformasi pertanian menuju modernisasi memerlukan pendekatan yang holistik. Penyuluh harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti penggunaan drone untuk pemantauan lahan, sistem irigasi pintar, hingga aplikasi digital untuk pencatatan dan pelaporan hasil panen. “Kita memasuki era baru di mana teknologi menjadi pendorong utama perubahan di sektor pertanian,” ujarnya.

Purwanta menegaskan, kini harapan besar tertuju pada generasi milenial dan Gen Z yang mulai menunjukkan minat terhadap sektor pertanian. Dengan pendampingan yang tepat, generasi muda ini dapat menjadi agen perubahan dalam mempercepat modernisasi pertanian. “Penyuluh pertanian diharapkan dapat menjadi mentor yang mendukung inovasi dan ide-ide segar dari para petani muda ini,” katanya.

Dengan adanya Inpres ini, pemerintah berharap peran penyuluh pertanian dapat lebih diberdayakan untuk mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan. Transformasi pertanian tidak akan berhasil tanpa peran aktif penyuluh. “Mereka adalah motor penggerak yang memastikan program-program pemerintah benar-benar sampai ke petani,” tegas Purwanta. **Herman/Yul**

# Langkah Cepat Kementan Kendalikan PMK

Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mengkhawatirkan peternak Indonesia kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan virus ini, termasuk vaksinasi massal, distribusi bantuan, serta edukasi kepada masyarakat peternak.



Desember 2024 sebanyak 51.200 dosis vaksin hibah telah disalurkan ke delapan provinsi, selain 65.000 dosis vaksinasi mandiri yang dilakukan di berbagai wilayah.

Tahun 2025, Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap ke 25 provinsi dengan kasus PMK.

"Sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit perbibitan, termasuk Jawa Barat (20.000 dosis), Sumatera Barat (20.000 dosis), Sumatera Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit perbibitan ternak (3.225 dosis)," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda.

Distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi. Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret. Sedangkan alokasi 2 juta dosis lagi direncanakan untuk vaksinasi periode kedua pada Juli hingga September 2025.

## Langkah Strategis untuk Menanggulangi PMK

Kepala Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Surabaya, Edy Budi Susila, yang memimpin kegiatan vaksinasi di Kabupaten Situbondo, menjelaskan bahwa vaksin yang digunakan telah teruji dan disetujui Ditjen PKH.

Sebanyak 50.000 dosis vaksin disebarkan, dengan fokus pada daerah-daerah yang memiliki



populasi ternak besar. Di Jawa Timur, misalnya, vaksinasi menasar daerah seperti Kediri, Blitar, Tulungagung, dan Jember, dengan masing-masing menerima 12.500 dosis.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK), Makmun menyampaikan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan komitmen nyata dari Kementan untuk melakukan pengendalian penyakit PMK di lapangan.

Tak hanya vaksin, Kementan juga menyediakan bantuan berupa obat-obatan, antibiotik, dan desinfektan, yang diharapkan dapat membantu peternak dalam mengatasi potensi penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan ternak.

## Pentingnya Kewaspadaan

Menghadapi prediksi meningkatnya jumlah kasus PMK pada akhir Desember 2024, Kementan mengingatkan peternak dan pemerintah daerah untuk meningkatkan

kewaspadaan. Direktur Jenderal PKH, Agung Suganda, mengungkapkan puncak penyebaran virus PMK diperkirakan akan terjadi hingga Maret 2025. Karena itu, pengawasan ketat terhadap lalu lintas hewan dan produk hewan harus dilakukan, termasuk penutupan pasar hewan jika ditemukan kasus PMK.

"Dalam rangka menghentikan penyebaran virus PMK, disinfeksi pasar hewan menjadi langkah yang sangat mendesak. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, sangat penting dalam menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan ketahanan pangan nasional," tegas Agung.

Untuk mempermudah pelaporan, Kementan menyediakan sistem iSIKHNAS dan layanan Hotline WhatsApp di nomor 0811-1182-7889, yang dapat digunakan peternak untuk melaporkan kasus PMK. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan jika ada ternak yang terinfeksi.

## Vaksinasi Berkala Kunci Perlindungan Ternak

Sementara itu Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengingatkan para peternak bahwa vaksinasi terhadap PMK tidak hanya dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan secara berkala. Vaksinasi yang teratur akan memperkuat perlindungan terhadap ternak dan mengurangi risiko penularan.

Wamentan juga menekankan pentingnya koordinasi antara semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat peternak, untuk memastikan sektor peternakan tetap

berjalan dengan baik.

Wamentan juga menghimbau peternak melakukan vaksinasi mandiri jika tidak mendapatkan kesempatan vaksin gratis dari pemerintah.

"Untuk vaksin kami sediakan, kalau tidak bisa dapat bantuan vaksin gratis bisa membeli secara mandiri dengan harganya yang nggak mahal berkisar Rp 17.000 hingga Rp 25.000 per dosis. Ini adalah investasi kecil untuk melindungi aset besar, yaitu ternak," ujar Sudaryono.

## Pendidikan dan Sosialisasi

Ditjen PKH juga melaksanakan sosialisasi kepada para peternak. Salah satunya di Pasar Hewan Kambing Wedus Adi Jaya dan BKS Farm (Berkah Kawin Suntik) di Lampung Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peternak dan pedagang ternak mengenai pentingnya pengendalian penyakit dan penerapan protokol biosekuriti.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Kementan untuk memastikan seluruh pihak memahami peran mereka dalam pencegahan PMK.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Ditjen PKH, Tri Melasari, menyampaikan bahwa langkah preventif menjadi kunci utama dalam menghindari penyebaran penyakit.

"Kami mengingatkan para peternak untuk tidak panik. Fokus utama adalah meningkatkan biosekuriti dan pemantauan lalu lintas ternak, sambil memastikan vaksinasi dilakukan dengan baik," ujar Tri.

## Kolaborasi untuk Sukseskan Ketahanan Pangan Nasional

Komitmen Kementan dalam mengatasi PMK bukan hanya terwujud melalui vaksinasi dan distribusi bantuan, tetapi juga melalui edukasi yang masif kepada peternak. Kementan terus mengingatkan bahwa kesuksesan dalam mengendalikan PMK memerlukan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, maupun masyarakat peternak.

"Kami berharap seluruh pihak bekerja sama untuk menjaga populasi ternak yang sehat, sekaligus melindungi kesejahteraan peternak. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, kita dapat bersama-sama mengatasi tantangan ini," ungkap Direktur Jenderal PKH, Agung Suganda. **Ditjen PKH**



# Gandeng Pemda Kendalikan PMK

Kementan membuka layanan Hotline Satuan Tugas Pelaporan Penyakit Hewan dengan nomor.

**0811-1182-7889**

Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tak mudah untuk diselesaikan. Bangsa Indonesia mempunyai pengalaman yang tak mudah dalam mengendalikan penyakit zoonosis tersebut.

Kementerian Pertanian pun menggandeng pemerintah daerah (Pemda) dalam mengatasi PMK. Misalnya, ketika terjadi kasus PMK di Desa Kedungguwo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kementerian Pertanian bersama Dinas Peternakan Magetan melakukan respon cepat upaya mengantisipasi penyebaran PMK.

Dinas Peternakan Magetan segera mengeluarkan surat edaran kewaspadaan dini kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan Kedungguwo. Selain itu, layanan darurat Unit Reaksi Cepat (URC) dari Dinas Peternakan Magetan juga diaktifkan untuk memberikan pengobatan kepada ternak yang terindikasi terkena PMK.

Bantuan berupa obat-obatan seperti antibiotik, multivitamin, disinfektan, dan alat suntik telah didistribusikan ke peternak. "Kami berharap peternak tidak panik dan tidak menjual ternak yang sakit untuk mencegah penyebaran lebih lanjut," ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNak), Makmun.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran peternak, Ditjen PKH menggelar sosialisasi di Desa Kedungguwo. Masyarakat diberikan pemahaman langkah pencegahan dan pengendalian PMK, seperti pentingnya vaksinasi, pengobatan dini, dan penguatan biosekuriti. "Kami mendorong peternak untuk lebih sadar akan pentingnya vaksinasi sebagai benteng perlindungan," kata Makmun.

Kementan juga mengimbau agar dinas peternakan di seluruh Jawa Timur bekerja sama dalam memantau kasus PMK. Data juga dilaporkan melalui sistem ISIKHNAS untuk memastikan pengendalian yang lebih terkoordinasi.

Sedangkan di Jawa Tengah, dilakukan pengawasan lalulintas hewan khususnya di pasar hewan Pasar Hewan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai jalur strategis penghubung tiga provinsi—Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur. Pasar dengan lalu lintas ternak yang



tinggi ini menjadi fokus pengamatan kesehatan ternak oleh tim Direktorat PKH melalui Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates dan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri.

Kepala BBVet Wates, Hendra Wibawa, yang memimpin langsung monitoring kesehatan ternak dan menyampaikan edukasi kepada para peternak di Wonogiri, meminta peternak untuk menjaga pasar hewan tetap aman dari penyakit hewan. "Jika ada ternak yang sakit atau menunjukkan gejala, jangan dibawa ke pasar untuk mencegah penularan," tegas Hendra.

Tidak hanya memberikan sosialisasi, tim BBVet Wates juga mengambil sampel dari ternak dan lingkungan pasar untuk diuji lebih lanjut, serta menyemprotkan disinfektan setelah pasar tutup. Langkah ini bertujuan meningkatkan biosekuriti di lokasi.

## Perkuat Edukasi

Kementerian Pertanian melalui Balai Veteriner (BBVet) Subang juga menggencarkan upaya pencegahan PMK di Kabupaten Indramayu. Bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, program vaksinasi dan edukasi PMK dilakukan secara intensif di sentra peternakan rakyat.

Sebanyak 318 dosis vaksin PMK diberikan kepada ternak sapi di wilayah Situbolang pada tanggal 6-7 Januari 2025. Selain itu, juga pengobatan dan pemberian multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan capaian vaksinasi PMK.

Sementara di Lampung Tengah, Kementan berkolaborasi dengan asosiasi dalam edukasi langsung kepada peternak. Kepala Balai Veteriner Lampung, Suryantana, menekankan langkah utama yang harus diambil untuk meminimalkan dampak PMK. "Biosekuriti, vaksinasi, dan pelaporan dini adalah kunci keberhasilan dalam pengendalian PMK," ujarnya.

Ia juga mengingatkan peternak untuk segera melaporkan gejala PMK pada ternak agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Senada dengan itu, Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi Lampung, Anwar Bahri, menjelaskan berbagai program pemerintah, termasuk vaksinasi massal dan pengawasan mobilitas ternak. "Pencegahan PMK adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh pelaku subsektor peternakan," katanya.

Sementara itu pada kegiatan sosialisasi di Pasar Hewan Kambing Wedus Adi Jaya dan BKS Farm (Berkah Kawin Suntik) Lampung Tengah, Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Tri Melasari, mengingatkan pentingnya antisipasi di tingkat peternak dan petugas lapangan.

"Kami mengimbau para peternak untuk tidak panik menghadapi PMK, tetapi tetap waspada dan fokus pada pencegahan. Biosekuriti yang ketat dan pemantauan lalu lintas ternak harus terus dijalankan," tegasnya.

Rochadi Tawaf, Dosen Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran mengingatkan penyelesaian masalah PMK membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah

daerah juga harus menyediakan dana yang cukup untuk menangani PMK. "Pembiayaan yang cukup, terutama untuk biaya operasional vaksinasi, sangat penting. Tanpa dana yang cukup, upaya vaksinasi di lapangan tidak akan berjalan efektif," katanya.

Ia juga menyarankan agar ada kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sekolah menengah kejuruan (SMK), mahasiswa kedokteran hewan, dan organisasi lainnya untuk mengerahkan tenaga SDM yang dibutuhkan dalam proses vaksinasi massal. "Harus ada gerakan bersama untuk menanggulangi penyakit ini. Tanpa itu, penyebarannya akan sulit dihentikan," tambahnya.

Selain vaksinasi, faktor lain yang juga sangat penting dalam menanggulangi PMK adalah kesadaran akan biosecurity di tingkat peternak. Rochadi melihat banyak peternak, terutama peternak rakyat, yang masih kesulitan untuk menerapkan standar biosecurity yang ketat di peternakan mereka.

Padahal, biosecurity yang baik merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit ini. Biosecurity tidak hanya berlaku untuk ternak, tetapi juga bagi manusia yang terlibat langsung dengan hewan. "Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya penerapan biosecurity yang ketat harus dilakukan secara masif," ungkapnya.

Rochadi juga menekankan perlunya upaya sosialisasi kepada peternak di lapangan. "Peternak harus diberi pemahaman yang baik tentang pentingnya pengendalian penyakit ini. Jangan anggap remeh wabah PMK, karena dampaknya bisa sangat merugikan," tuturnya.

**Herman/Yul**

# Erni, Mentereng Berkat Cireng

Kuliah di IPB University, kemudian mengabdikan menjadi guru TK, Erni Rahman justru terkenal dengan produk Cireng Crispy Shaza Food. Itulah perjalanan panjang, alumni Program Studi Informatika dalam upaya memberdayakan lingkungan tempat tinggalnya.

Akhir dari keluarga guru membuat Erni mantap memilih pekerjaan awalnya sebagai seorang guru TK. Pengabdian sebagai pendidik dilakukan sejak 1997 di sela kesibukannya kuliah. Hingga akhirnya pada 2006, ia menjadi Kepala Sekolah TKIT Darussalam, Reni Jaya, Bojongsari, Kota Depok.

Kecintaannya dalam mengajar, Erni terdorong untuk memperdalam ilmu kependidikan sebagai Sarjana Pendidikan di PGSD Universitas Terbuka dan lulus pada 2018. Semakin ia mendalami dunia mengajar, harapannya memberi dampak yang lebih baik kepada masyarakat semakin besar.

Dari sinilah Erni berpikir untuk menjadi seorang pengusaha agar memiliki banyak karyawan yang bisa ia sejahterakan dan dapat memberdayakan lingkungan sekitar. Sambil menjalankan rencana bisnisnya, Erni tak lantas melepas profesinya sebagai guru TK.

"Menjadi guru adalah bagian dari keinginan saya memberi dampak positif pada dunia pendidikan anak. Tetapi selain itu saya punya mimpi, agar keberadaan saya bisa memberikan dampak manfaat secara sosial kepada ekonomi keluarga," kata Erni yang lulus tahun 1999.

Dirinya tergerak membangun usaha karena di lingkungannya banyak pemuda lulusan SMA yang menganggur. Alumni S2 Magister Manajemen Universitas Pamulang Tangerang yang lulus pada 2021 dengan predikat Cumlaude ini kemudian berharap bisa mengangkat pamor cireng dan memutuskan memulai usaha Cireng Crispy dengan brand Shaza Food.

"Saya pernah baca bahwa ketika memulai usaha, kita mulai dari hobi, kesukaan. Kebetulan cireng itu kesukaan saya. Dan saya

bilang cireng itu mudah dibuat," ujar wanita kelahiran Sukabumi, 12 Agustus 1997 itu. Di awal-awal usahanya, menjajakan Cireng Crispy Shaza itu ia lakukan dengan sangat sederhana dengan menawarkan ke keluarga, dari pintu ke pintu dan kegiatan rapat sekolah.

Meski sebagai Kepala Sekolah PUAD, istri dari Yudi Fitriawan ini mengaku tidak gengsi menjajakan usahanya. Tak hanya di sekolah, saat menjadi pengisi seminar PAUD, ia juga menawarkan ke panitia agar souvenirnya cireng. Sama seperti para pengusaha lain, jalan rezekinya tidak serta merta mulus. Banyak cobaan hingga tantangan yang telah dilaluinya, termasuk kegagalan dalam produksi dan tertipu hingga merugi Rp200 juta akibat distributor yang tidak membayar.

## Berbagai Cara

Ibu dari M Zaky Nurfajar dan Azkiya Shafa Shalihah ini memasarkan produk cirengnya dengan berbagai metode penjualan, mulai dari supermarket hingga via online seperti instagram. Hingga saat ini sudah terdaftar ratusan orang yang menjadi resellernya, tersebar di berbagai kota di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera sampai di ujung Papua.

Di tahun 2015, ia melihat peluang dengan menjual varian cireng crispy dengan sambal rujak. Alhasil, omzetnya melonjak drastis. Tak pernah menyangka, dalam sebulan Erni bisa mengantongi omzet penjualan hingga Rp1 miliar.

"Modal awal ini saya hanya hitung bukan dari aset ya kayak kompor, kualiti. Dulu Rp50 ribu dari bahan pembuat cirengnya. Dari modal itu saya jual dan saya dapat Rp100 ribu (10 bungkus), begitu seterusnya sampai saya produksi maksimal 2 ton atau 10 ribu pack," katanya lagi.

Untuk menghasilkan cireng yang berbeda dengan yang ada di pasaran, Erni melakukan uji resep. Dalam proses uji coba tersebut,



mereka menemukan resep cireng yang unik yakni Cireng Crispy dengan bumbu rujak. "Cireng crispy, walau didiamkan selama 1 jam tetap crispy. Padahal kita tidak menggunakan bahan pengawet loh," ucap Erni yang memperoleh anugerah Perempuan Inspiratif Kota Depok Tahun 2018.

Pada awalnya Shaza Food hanya membuat Cireng Crispy Original, namun dengan banyaknya kompetitor. Wanita yang biasa dipanggil Bunda Ani itu mulai berinovasi mengeluarkan beragam varian. Mulai dari Cireng Crispy Vegetable (campuran bayam dan wortel), Cireng Crispy Keju, Cireng Crispy Ubi Ungu, Mpek-Mpek Cireng, Cireng Crispy Sosis Pedas, dan Cireng Gejrot. "Kompetitor membuat saya kreatif," ujar wanita lulusan SMAN 1 Sukabumi itu.

Baginya inovasi merupakan hal penting agar produk yang dibuat tetap laku di pasaran. Sebagai pelopor Cireng crispy, dari berbagai varian Shaza Food, Cireng Crispy Original merupakan produk best seller. Pada tahun 2016, Shaza Food satu-satunya pabrik cireng yang mendapatkan piagam bintang keamanan pangan dari BPOM Jabar.

Bahkan pada 2022 beberapa produk best sellernya sudah mendapatkan ijin edar BPOM Makanan Dalam (MD). Karena itu, di produknya terdapat tanda Bintang sebagai tanda best seller atau top brand. "Ini punya nilai jual dan tidak

banyak orang yang punya label bintang di pangan," kata Bunda Ani.

Kini beragam produk diproduksi tiap hari antara 3-5 ribu pack. Rata-rata produksi tiap bulan mencapai 100 ribu pack dengan omset mencapai Rp1 miliar. Keuntungan bersih mencapai Rp100 juta atau 10% persen dari omset.

Perkembangan usaha yang pesat, tidak membuatnya terlena. Ia terus melakukan inovasi agar usahanya tetap bertahan dan makin berkembang. "Makanan itu orang bisa bosan. Jadi kalau bisa eksis di 5 tahun, itu udah luar biasa. Saya kepengen ini bukan usaha musiman tapi langgeng," ujarnya.

Kini Shaza Food telah hadir di beragam pasar modern dan supermarket. Sebut saja Carrefour, Giant, Hari Hari Swalayan, Tip Top, Diamond, Total Buah, Aeon Mall, Gelael, Aneka Buana, dan Yoga Swalayan.

Selain produk Shaza Food yang telah masuk ke pasar retail modern, cara lain dilakukannya agar usaha terus dilakukan dengan membuka edutrip bagi anak-anak TK yang ingin melihat proses pembuatan cireng. "Karena saya juga pendidik, jadi buka edutrip, buka kunjungan field trip anak-anak TK. Jadi mereka lihat pembuatan cireng. Saya ajak guru-guru TK dan anak-anak untuk ke pabrik cireng. Jadi dengan acara ini secara tidak langsung mempromosikan cireng," ucap wanita berhijab ini. **Sumber alumniipbpedia/Yul**

# Menyongsong Asa Baru, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP)

Oleh: **Muhammad Syahri Mubarak, SST., M.P.,**  
Penyuluh Pertanian di BPSIP Jawa Tengah

Sebagai negara agraris, Indonesia akan menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem pertanian yang maju dan modern. Seiring dengan semakin kompleks dan berkembang pesatnya kebutuhan pangan global dan kebutuhan pangan domestik, mau tidak mau memerlukan langkah strategis untuk mentransformasikan sektor pertanian agar lebih produktif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap percepatan perubahan zaman.

Namun kenyataannya, praktik dan metode bertani di lapangan yang selama ini dilakukan para petani masih bergantung dan identik dengan cara tradisional. Meskipun, padaskala kecil telah ada sekelompok petani yang mengadopsi teknologi pertanian baru.

Hal ini tentu saja memerlukan upaya yang sistematis dan terkoordinasi dengan baik untuk mengubah pola metode bertani di lapangan. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan berinvestasi dalam perekayasa dan perakitan teknologi pertanian yang modern agar meningkatkan hasil pertanian, serta memperkenalkan sistem yang lebih efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang bertransformasi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) (berdasarkan Perpres No. 192 tahun 2024) diharapkan menjadi motor penggerak dalam mempercepat proses modernisasi pertanian Indonesia.

Selain itu, adanya badan baru ini diharapkan dapat menjadi lembaga yang mengintegrasikan perekayasa, perakitan, peng-

ujian, penyebarluasan dan penerapan pertanian modern, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian untuk membawa sektor pertanian Indonesia menuju era modern yang lebih produktif, adaptif, efisien, maju, modern, dan berkelanjutan.

Hal ini, akan sangat strategis dalam menyatukan berbagai upaya, mulai dari mendorong perakitan varietas unggul, percepatan adopsi dan penerapan pertanian modern, pengembangan SDM pertanian, peningkatan rantai pasok, kebijakan dan perekayasa pertanian modern yang mendukung sistem pertanian efisien dan produktif.

Diharapkan dapat membantu menciptakan sektor pertanian yang lebih adaptif terhadap tantangan global yang lebih kompetitif serta menjawab tantangan ketahanan pangan Indonesia kedepan.

Perakitan varietas unggul yang adaptif dan tahan terhadap tantangan, tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga mampu memberikan ketahanan budidaya terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan iklim dan hama penyakit.

## Modernisasi Pertanian

Sektor pertanian memiliki banyak potensi dikembangkan dan dimodernisasi dengan penggunaan peralatan berteknologi canggih, seperti alat dan mesin modern, sistem irigasi pintar berbasis sensor, aplikasi pertanian berbasis platform digital yang terintegrasi, mudah diakses dan *realtime*.

Melalui peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi biaya operasional, dan tepat dalam

pengelolaan sumberdaya alam.

Pengembangan sumberdaya manusia disektor pertanian menjadi penentu untuk memastikan proses adopsi teknologi pertanian baru dapat dilakukan secara efektif atau tidak. Petani dan tenaga kerja sektor pertanian perlu keterampilan yang cukup, agar dapat memanfaatkan teknologi modern dan metode pertanian berkelanjutan. Mengedukasi petani dan melatih penyuluh agar memperoleh pengetahuan dan teknologi pertanian baru.

Rantai pasokan dan distribusi produk pertanian yang panjang dan tidak efisien, menjadi problem petani di lapangan. Proses distribusi yang lambat dan berbiaya mahal mengakibatkan harga produk pertanian tinggi dan tidak stabil, serta sering menyebabkan pemborosan hasil pertanian.

Perlu adanya sistem distribusi produk pertanian yang lebih cepat, terjangkau dan efektif untuk mengurangi pemborosan dan memastikan petani mendapatkan harga yang adil untuk pendistribusian hasil pertanian mereka.

Rantai pasokan dan distribusi yang lebih efektif, diharapkan produk pertanian dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Perlu adanya kolaborasi lintas sektor untuk membangun kerjasama dengan perusahaan distribusi logistik, pengepul, dan retailer produk pertanian agar jaringan distribusi lebih efisien dan transparan.

## Perekayasa, Perakitan Pertanian dan Kebijakan

Rangkaian perekayasa, perakitan pertanian yang kuat disertai dengan kebijakan yang

mendukung adalah tulang punggung transformasi sektor pertanian.

Lahirnya BPMP akan berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat guna, mendukung perekayasa dan perakitan dibidang pertanian yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan.

Membuat dan menetapkan kebijakan yang mendorong serta merangsang kemauan untuk melakukan perekayasa dan perakitan dibidang pertanian, mengatasi masalah utama sektor pertanian, sekaligus mendukung petani mengakses teknologi pertanian baru yang lebih modern dan jaringan pasar yang lebih luas.

Tantangan yang harus dihadapi BPMP, diantaranya keterbatasan anggaran untuk melakukan investasi dalam perekayasa dan perakitan pertanian, kesulitan mengedukasi petani dalam mengadopsi dan menggunakan teknologi pertanian modern, infrastruktur yang masih belum memadai, serta dampak perubahan iklim yang semakin memperburuk kondisi pertanian.

Menyongsong asa baru Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menjadi langkah strategis dorong transformasi sektor pertanian. Sinergisitas dalam menggabungkan perekayasa, perakitan, pelatihan, serta kebijakan yang tepat guna, agar pertanian dapat lebih produktif, adaptif, efisien, maju, modern, dan berkelanjutan.

Keberhasilan bergantung kolaborasi lintas instansi baik pemerintah, swasta, dan petani untuk memastikan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.

## Penyuluh Ditarik ke Pusat

Melimpahnya peserta Webinar tentang "Peluang dan Tantangan Penyuluh Pertanian ditarik ke Pusat" pada tanggal 9 Januari 2025 menyiratkan besarnya perhatian dan harapan revitalisasi penyuluhan pertanian. Data menunjukkan bahwa sejak 2012 produktivitas rata-rata padi nasional mengalami stagnasi pada 5,0-5,2 ton per hektar sehingga diharapkan penyuluhan akan berperan lebih optimal jika kembali dalam penanganan pemerintah pusat. Mengapa?

Tak kurang dari pejabat yang menangani SDM Pertanian menyatakan bahwa hal ini terkait dengan melemahnya penyuluhan akibat perubahan manajemen penyuluhan di daerah. Dihilangkannya Bakorluh/Bapeluh, program di daerah yang tidak *inline* dengan program pusat, kurangnya dukungan anggaran di daerah, kurang memadainya kuantitas dan kualitas SDM penyuluh, menyebabkan rendahnya transfer teknologi, pelayanan penyuluhan pertanian, kolaborasi dan kurang efektifnya pendampingan dan fasilitasi sarpras (pupuk, benih, alsintan, modal). Kondisi ini juga terjadi pada sektor perkebunan dan peternakan.

Upaya swasembada perlu dukungan penyuluhan. Intensifikasi melalui peningkatan

IP, optimasi lahan dan cetak sawah baru dalam skala nasional memerlukan dukungan penyuluhan masif dan koordinasi yang efektif. Penyuluh di daerah pun merasa lebih berperan optimal apabila penyuluhan ditangani oleh pemerintah pusat. Lalu bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan pengalihan kewenangan ini?

Pelaksanaannya tidak semudah seperti membalik tangan. Ada kebutuhan penyesuaian organisasi, kelembagaan dan administrasi yang menanganinya di pusat dan di daerah sehingga SDM dan karir penyuluh, aset, program dan pelaksanaan penyuluhan dapat disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penyuluhan bagi daerah boleh jadi merupakan beban, *cost center yang tidak memberikan dampak* pendapatan daerah dalam jangka pendek. Biaya operasional di lapangan, pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi penyuluh memerlukan dana yang cukup besar.

Sementara gerak cepat upaya nasional swasembada yang dirancang pemerintah pusat, melalui optimasi lahan, cetak sawah, revitalisasi sistem irigasi dan bendungan, pelibatan petani Milenial/Gen Z, dan transformasi pertanian tradisional ke modern memerlukan pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh pertanian dengan kualitas mumpuni. Pelaksanaan kewenangan



Oleh: **Memed Gunawan**

penyuluhan pertanian di daerah tidak optimal karena hanya diwadahi setingkat bidang, seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF). Tegasnya terjadi kesenjangan antara potensi pertanian dengan jumlah penyuluh pertanian sehingga penyuluhan perlu digerakkan oleh satu institusi dengan kewenangan cukup memadai di tingkat Pemerintah Pusat.

Sejauh mana pelaksanaan pengalihan kewenangan sudah berlangsung untuk mendukung pelaksanaan program swasembada di lapangan? Proses ke arah itu sudah dimulai dan terus berjalan, tapi pekerjaan rumah masih panjang menyangkut kebijakan dan rancangan peraturan presiden tentang urusan pemerintahan, koordinasi dengan kementerian terkait, percepatan pembahasan rancangan peraturan presiden, dan organisasi, kelembagaan, administrasi serta aturan pelaksanaan di daerah. Yang diperlukan adalah proses yang cepat sehingga dukungan penyuluhan yang masif dapat dilakukan.

Proses yang suka atau tidak suka harus dilalui dan dengan kecepatan tinggi.



# Cabut Izin Distributor Pupuk Nakal

Pemerintah baru saja mengumumkan petani bisa mendapatkan pupuk subsidi mulai 1 Januari. Tapi di lapangan justru petani mulai mengeluhkan harga pupuk subsidi berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Menyikapi hal itu, pemerintah tidak akan menoleransi penyelewengan pupuk subsidi. Ancamannya adalah pencabutan ijin.



**K**eluhan petani terhadap distribusi pupuk mulai terdengar. Seperti petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terpaksa harus menebus pupuk subsidi seharga Rp300 ribu per kuintal atau melebihi HET. Keluhan juga datang dari petani Kabupaten Bone terkait proses pendistribusian yang tidak sesuai HET.

Kondisi harga pupuk yang tinggi di NTB itu terungkap saat Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono melakukan tanam raya padi varietas unggul Gajah Mada Gogo Rancah (Gamagora) 7 bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Desa Pengembur, Kecamatan Punjut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (6/1).

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini kemudian meminta PT Pupuk Indonesia segera menelusuri masalah ini agar petani bisa membeli pupuk sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah. "Yang paling mahal disini berapa? Rp 300 ribu per 1 kwintal? Berarti Rp 150 ribu per sak. Nah, disini sudah ada direksi dari PT Pupuk Indonesia, Insya Allah hari ini masalah pupuk di NTB selesai," tegas Sudaryono.

Sudaryono mengakui, permasalahan yang kerap dihadapi petani untuk menuju swasembada pangan selama ini salah satunya adalah persoalan pupuk. "Kalau ditanya ke petani permasalahan di pertanian, selalu jawabnya pupuk. Harga pupuk di pengecer itu harga Rp 115.000 per sak isi 50 kg. Jadi kenapa ada praktik harga lebih mahal? Biasanya dibebankan ongkos kirim, karenanya ada yang harganya Rp 150.000. Jadi kios sudah benar menjual Rp 115.000, hanya ada variasi ongkos kirim dan juga kontribusi

kepada iuran kelompok," ungkapnya.

Karena itu ia mengungkapkan, per 1 Januari 2025, Kementerian Pertanian resmi menetapkan HET pupuk bersubsidi sebesar Rp 2.250/kg untuk pupuk urea, pupuk NPK Rp 2.300/kg, pupuk NPK untuk kakao Rp 3.300/kg, serta pupuk organik Rp 800/kg. Bahkan, sistem distribusi pupuk telah diperbaiki agar lebih efisien dan langsung ke petani.

Sebelumnya menurut Mas Dar, penyaluran pupuk itu dilakukan secara berjenjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Namun kini pemerintah telah memangkas 145 terkait distribusi pupuk. Saat ini distribusi pupuk tersebut langsung disalurkan dari PT Pupuk Indonesia ke pengecer dan gapoktan.

Dengan adanya penyederhanaan aturan, pemerintah berharap distribusi pupuk dapat berjalan lebih cepat, tanpa kendala seperti tahun-tahun sebelumnya yang memerlukan waktu berbulan-bulan. "Kita harapkan tidak ada lagi permasalahan terkait pupuk di tahun 2025 ini. Layanan kios untuk distribusi pupuk ke petani berjalan dengan baik," katanya.

Sudaryono menjelaskan, distribusi pupuk subsidi ini untuk petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi). Ketentuan lainnya memiliki luas lahan maksimal 2 hektar, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

Pemerintah juga memastikan kebutuhan pupuk untuk 2025 sudah dipastikan aman. Melalui Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi untuk tahun 2025 sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan organik 500.000 ton.

"Di tahun 2025, di era Pak Prabowo sekarang ini, kuotanya bukan kuota anggaran, tapi kuota volume pupuk. Sehingga fluktuasi harga bahan baku tidak masalah karena sudah dipatok volume pupuknya 9,5 juta ton. Sehingga harusnya tidak ada masalah," ungkapnya.

## Pantau Penyaluran

Pemerintah kata Sudaryono juga berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan penyaluran pupuk berjalan lancar, serta membuka saluran pengaduan bagi petani yang mengalami masalah di lapangan. "Kita buka laporan dari penyuluh-penyuluh pertanian kita. Kita juga buka apa layanan pengaduan kalau ada persoalan di lapangan," tuturnya.

Sudaryono juga mengajak kepada organisasi Pemuda Tani Indonesia berperan aktif dalam mengawasi distribusi pupuk subsidi. Hal ini penting agar tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan di lapangan, terutama dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang langsung kepada petani. Apalagi kuota pupuk subsidi telah ditambah menjadi 9,5 juta ton per tahun.

Karena itu, menurutnya, diperlukan peran dari Pemuda Tani untuk menjadi mata dan telinga pemerintah

dalam mempermudah penyaluran pupuk subsidi. Laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti tim Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. "Semua laporan akan kami follow up dengan cepat. Ini demi tercapainya swasembada pangan sesuai instruksi Presiden Prabowo. Beliau sangat menekankan untuk tidak bertele-tele dan langsung bekerja," jelasnya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga menegaskan akan menindak tegas bagi penyelewengan pupuk subsidi. Ia mencontohkan beberapa langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) menindak penyelewengan. Salah satunya pada November 2024 lalu, Kementan mencabut izin edar empat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan penyelewengan di sektor pertanian, khususnya terkait pupuk. Apalagi persoalan pupuk menjadi perhatian pemerintah.

Selain itu, sejak 1 Januari 2025, sistem penyaluran pupuk telah disederhanakan dan langsung didistribusikan dari PT Pupuk Indonesia ke pengecer dan gabungan kelompok tani. Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani yang terdaftar e-RDKK juga dipermudah dengan menggunakan KTP.

Berbagai upaya ini dilakukan untuk mempermudah petani Indonesia dan mendorong produktivitas pangan nasional demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Salah satunya adalah mempermudah petani mendapatkan pupuk subsidi.

# Sambut Musim Panen, HPP Gabah Naik

Menjelang musim panen tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan kebijakan baru dalam perberasan nasional. Salah satunya dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani. Rencananya regulasi baru tersebut akan pemerintah umumkan 15 Januari 2025.



Sinyal kenaikan harga gabah tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan usai Rakor Pangan di Jakarta, Senin (6/1). Sinyal tersebut sempat diungkapkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam beberapa kali kesempatan, salah satunya setelah mengikuti Rapat Terbatas tentang swasembada pangan di Istana Negara, Senin (30/12).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mengumumkan mulai 15 Januari 2025, harga gabah kering panen (GKP) dinaikkan menjadi Rp6.500/kg dari sebelumnya Rp 6.000/kg. Sedangkan harga pembelian beras di gudang Bulog sebesar Rp 12.000/kg.

Keputusan ini sudah dipastikan, dan Bulog akan membeli gabah langsung dari petani dengan harga tersebut. Bahkan pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan daya serap gabah petani tanpa merugikan pihak manapun.

Selain kebijakan tentang gabah, Zulkifli juga mengungkapkan pemerintah melalui Bulog akan menyerap jagung dengan harga Rp5.500/kg. HPP jagung juga naik dari sebelumnya Rp 5.000/kg. Untuk HPP jagung akan berlaku efektif mulai 1 Februari 2025.

## Serapan Gabah Lebih Baik

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan, penyesuaian kebijakan HPP untuk gabah, beras, dan jagung bertujuan agar hasil produksi petani dapat terserap dengan baik oleh Perum Bulog, sebagai upaya

pemerintah untuk menyejahterakan petani dan meningkatkan produktivitas pertanian.

"Penyesuaian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong produktivitas pertanian dalam negeri," ujar Arief seraya menambahkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai komitmen pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan dan swasembada pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga gabah dan memastikan serapan hasil panen petani berjalan maksimal. Serapan gabah sesuai HPP yang baru menurutnya, menjadi salah satu kunci keberhasilan swasembada pangan.

"Saya titip serapan gabah. Kalau serapan bermasalah, swasembada pangan juga bermasalah. Yang kedua, saya titip irigasi tersier, sekunder, dan primer segera dinormalisasi. Dua hal ini adalah kunci keberhasilan," ujar Amran.

Dilaporkan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, petani menghadapi tekanan berat akibat harga gabah yang jatuh dikisaran Rp5.300-5.800/kg. Di Kecamatan Muara Padang, Muara Sugihan, dan Air Saleh yang sedang memasuki masa panen, harga gabah hanya mencapai Rp5.300/kg. Sementara itu, di Kecamatan Tanjung Lago, harga jauh lebih baik yakni Rp5.800/kg.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Banyuasin, Sarip, mengungkapkan bahwa peran Bulog dalam menyerap gabah petani

masih belum maksimal. Hal ini menjadi salah satu penyebab harga gabah terus menurun. "Sampai saat ini, serapan Bulog belum maksimal dan belum mengacu pada HPP yang sudah diterapkan," ujarnya.

Berdasarkan data Kerangka Sampling Area (KSA) dari BPS, potensi luas panen padi di Kabupaten Banyuasin pada Januari 2025 mencapai 25.542 ha, sementara Februari diproyeksikan seluas 46.536 ha. Secara keseluruhan di Sumatera Selatan, potensi panen padi pada Januari tercatat seluas 44.351 ha dan pada Februari diperkirakan mencapai 74.699 ha.

## Monitoring Titik Panen

Sementara itu menyambut musim panen, Perum Bulog siap melakukan penyerapan mulai dari titik-titik yang sudah panen terlebih dahulu di beberapa daerah. Bahkan Bulog sudah mempersiapkan beberapa strategi untuk penyerapan gabah/beras petani dalam negeri.

Selain optimalisasi infrastruktur seperti Sentra Pengolahan Padi dan Sentra Pengolahan Beras yang tersebar di seluruh Indonesia, Bulog berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di tiap wilayah kerja untuk memonitoring titik panen dan berkoordinasi dengan mitra kerja pengadaan untuk optimalisasi penyerapan di tiap lini.

Mokhammad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog mengatakan, sambil menunggu keputusan berlakunya penyesuaian HPP untuk Gabah dan Beras yang terbaru hasil keputusan Rakortas 15 Januari 2025 nanti, pihaknya

akan melibatkan stakeholders untuk monitoring beberapa titik panen, terutama menjelang panen raya yang diperkirakan pada Februari.

"Tim kami di lapangan sudah mempunyai data prakiraan panen sesuai KSA BPS dan data luas realisasi tanam dari Dinas Pertanian dan terus memantau perkembangan tanam," kata Suyamto. Selain itu lanjutnya, pihaknya juga sudah menyiapkan titik titik pembelian gabah petani dengan menggunakan sarana pengolahan sendiri maupun bekerja dengan mitra penggilingan.

Pada tahun ini Perum Bulog menargetkan penyerapan sebanyak 3 juta ton setara beras. Untuk itu, kata Suyamto, pihaknya telah membentuk Tim Jemput Gabah agar penyerapan gabah lebih masif dan optimal sesuai ketentuan/spesifikasi yang berlaku.

"Periode sekarangpun kami masih melakukan penyerapan dengan mengacu pada HPP yang telah ditentukan sebelumnya. Kami berupaya untuk memenuhi target penyerapan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program pemerintah, tentunya dibutuhkan koordinasi yang baik bagi tiap stakeholders kami di seluruh wilayah kerja Bulog," tutur Suyamto.

Terkait adanya informasi harga gabah jatuh di Sumatera Selatan, Bulog sendiri bersama para stakeholders seperti Dinas Pertanian dan Gapoktan setempat sudah melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud. Bulog terus melakukan monitoring di titik-titik panen yang sudah berjalan dan tentunya akan melakukan penyerapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku. **Yul**

# Ditarik ke Pusat, Ini Suara Penyuluh Daerah

Langkah pemerintah menarik penyuluh pertanian ke tingkat pusat menjadi sorotan, karena membawa peluang besar sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi. Bagaimana suara penyuluh di lapangan?



Ketua DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia, Warsana



Seperti diketahui pemerintah telah berancang-ancang menarik kembali tenaga penyuluh pertanian yang ada di daerah ke pusat. Bahkan Instruksi Presiden telah disiapkan. Berbagai pertimbangan yang mendorong rencana tersebut, salah satunya adalah upaya pemerintah mengejar target swasembada pangan yang memerlukan dukungan penyuluh lebih besar.

Bagaimana peluang dan tantangan penyuluh pertanian menjadi pegawai pusat? Apa plus minusnya? Tabloid Sinar Tani akan mengupasnya dalam webinar bertema Peluang dan Tantangan Penyuluh Pertanian Ditarik ke Pusat, Kamis (9/1).

Webinar tersebut mendapat apresiasi cukup besar dari kalangan penyuluh dengan peserta di zoom menembus angka kapasitas 1.000 peserta. Selain itu ditambah dengan peserta melalui Youtube SINTATV yang mencapai 21 ribu lebih view.

Ditengah kebimbangan penyuluh daerah yang kemungkinan menjadi pegawai pusat banyak pertanyaan baik melalui chat di zoom maupun lewat Youtube. Misalnya, Kepala bidang Penyuluh Pertanian di Dinas Pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Putranto.

Meski menyambut baik penarikan kewenangan penyuluhan pertanian ke pusat, namun dirinya berharap pemerintah membuat regulasi yang sesuai dengan keadaan di daerah. "Kami pertanyakan, kalau seandainya kewenangan atau penyuluhan ini ditarik ke pusat, bagaimana kelembagaan di bidang penyuluhan, apakah juga ditarik ke pusat," katanya.

Sebab, menurutnya, bidang

penyuluhan di daerah ada tiga fungsional yakni ketenagaan, kelembagaan dan juga fungsional media dan informasi. Jika kewenangan penyuluh pertanian ditarik ke pusat, maka fungsional penyuluhan yang ada di bidang masing-masing tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya.

Karena itu, ia berharap agar pemerintah memikirkan juga bagaimana regulasi terkait kelembagaan penyuluh di daerah. "Apakah kelembagaan penyuluhan ini juga ditarik ke pusat atau cukup tenaga penyuluh saja yang ditarik ke pusat," ujarnya.

Kebingungan juga nampak dari pernyataan Wulansari, penyuluh pertanian Kabupaten Lahat, yang tengah tugas belajar yang kini dalam posisi diberhentikan sementara dari jabatan, apakah akan ditarik ke pusat juga.

"Saya ingin tanyakan untuk PPL yang sedang tugas belajar dengan status diberhentikan sementara dari jabatan, apakah diikuti dalam database juga atau seperti apa? Padahal dalam tugas belajar tersebut, kami ada perjanjian ikatan dinas dari daerah," ungkapnya.

Sinta Dewi Andaru, Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu juga mempertanyakan mengenai kemungkinan ada relokasi penyuluh

ke tempat lain ketika penyuluh sudah berada di pusat.

"Terkait penarikan Penyuluh Pertanian ke tingkat pusat apakah ada kemungkinan relokasi dari penugasan awal? Jika ada, apakah ada ketentuan yang menentukan lokasi penugasan baru? Seperti dikembalikan ke domisili awal atau bagaimana?" ungkapnya dalam chat zoom.

## Kelembagaan Penyuluh

Sementara itu Ketua DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia) Jawa Tengah, Warsana menegaskan, keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian memegang peranan penting dalam meningkatkan kapasitas petani dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

"Kelembagaan penyuluhan adalah jembatan yang menghubungkan pemerintah, petani, dan berbagai pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan pertanian yang maju dan berdaya saing," ujar Penyuluh Pertanian Ahli Utama ini.

Menurut Warsana, kelembagaan penyuluhan pertanian dirancang untuk menjalankan fungsi koordinasi, pengelolaan, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan penyuluhan. Struktur kelembagaan ini terbagi menjadi empat tingkatan

yaitu pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Di tingkat kecamatan, keberadaan balai penyuluhan menjadi ujung tombak penguatan kapasitas petani.

"Kita membutuhkan kelembagaan yang mampu beradaptasi dengan dinamika dan tantangan sektor pertanian saat ini. Perlu integrasi yang solid antara kelembagaan di berbagai tingkatan," kata Warsana. Karena itu, penguatan kelembagaan harus dilakukan dengan langkah konkret, seperti pembentukan tim strategis dan terpadu yang kompeten di bidang penyuluhan, serta pelibatan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pusat.

Dengan kuatnya kelembagaan penyuluh pertanian, Warsana mengatakan, akan ada meningkatkan kapasitas penyuluh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, termasuk pengawalan dan pendampingan program prioritas pemerintah.

Karena itu, Warsana menilai, penarikan penyuluh ke tingkat pusat memberikan peluang yang besar bagi pengembangan profesional dan kontribusi mereka dalam skala nasional. Beberapa peluang tersebut meliputi akses ke kebijakan strategis yakni penyuluh dapat terlibat langsung dalam perumusan kebijakan nasional. "Ini kesempatan langka bagi penyuluh untuk memengaruhi keputusan strategis yang berdampak luas," ujarnya.

Selain peluang, Warsana menyoroti tantangan yang harus diatasi. "Meski peluangnya besar, penyuluh juga menghadapi tantangan yang tidak kecil," ungkapnya. Beberapa tantangan adalah persaingan ketat karena seleksi untuk menjadi bagian dari kelembagaan pusat sangat kompetitif. "Penyuluh juga harus siap memahami birokrasi pusat yang lebih kompleks," katanya.

Tantangan lainnya, berkurangnya interaksi langsung dengan petani dapat mengurangi kepekaan terhadap kebutuhan riil di lapangan. Penyuluh juga akan mendapatkan tekanan kerja yang cukup tinggi. Pasalnya, penyuluh di tingkat pusat sering kali menghadapi tenggat waktu yang ketat dan target kerja yang berat.

Selain itu menurut Warsana, adanya tantangan dalam koordinasi dengan daerah. Untuk menjembatani kebijakan pusat dengan implementasi daerah memerlukan komunikasi yang efektif. Pasalnya, koordinasi sudah pada tataran antar provinsi, bukan lagi antar kabupaten atau kecamatan. **Herman/Yul**



# Lidah Buaya Alan Effendi, Mengubah Nasib Gunung Kidul

Di tengah kerasnya tantangan kekeringan di Gunung Kidul, Alan Effendi hadir dengan solusi brilian. Lidah buaya, yang dulu terabaikan, kini menjadi sumber harapan dan ekonomi warga desa.

Dari keindahan Gunung Kidul yang terkenal dengan keindahan karst dan gua-gua alami, ada cerita inspiratif yang lahir dari tangan seorang pemuda setempat bernama Alan Effendi.

Tantangan kemarau dan kekeringan di Gunung Kidul boleh dibilang menjadi kawan lama masyarakat disana. Namun bagi Alan, tantangan itu menjadi sebuah perjalanan inovasi.

Di suatu waktu, Alan mempelajari bahwa tanaman lidah buaya atau akrab dikenal sebagai *Aloe Vera* menyimpan potensi besar, terutama kemampuan tanaman ini yang tangguh di kondisi minim air sehingga cocok untuk wilayah Gunung Kidul yang sering kekurangan pasokan air.

Namun, dengan potensi Gunung Kidul yang berada di daerah tinggi dengan paparan sinar matahari tinggi dan tanah yang tidak terlalu

lembab menjadikannya cocok untuk pertumbuhan *Aloe Vera*.

Alan memulai perjalanan menggeluti budidaya si lidah buaya ini sejak sepuluh tahun lalu dengan memutuskan meninggalkan zona nyamannya di Ibu Kota.

"Tapi saat itu saya tidak punya pengalaman bertani sama sekali. Saya pun belajar otodidak budidaya lidah buaya dari internet," ungkapnya.

"Setelah melihat *Aloe Vera* bisa bertahan di musim kemarau dan memiliki banyak manfaat, saya semakin serius membudidayakannya," tuturnya.

Selain membudidayakan sendiri, ia juga mencoba meyakinkan warga sekitar untuk ikut terlibat dalam usahanya, termasuk menggunakan layanan mereka.

Dengan semangat yang tak luntur, upaya pemberdayaan masyarakat yang diusahakan Alan terutama untuk ibu rumah tangga dan petani

lokal pun berhasil.

Warga yang sebelumnya bekerja serabutan atau buruh tani, kini punya penghasilan tetap dengan menjadi petani mitra yang rutin memasok bahan baku lidah buaya ke Alan.

"Dulu, banyak warga yang ke sulit mencari nafkah saat musim kemarau. Sekarang mereka memiliki penghasilan rutin," ujar Alan.

Tak hanya rutin memasok, petani mitra diberi pelatihan juga oleh Alan terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman bertani.

## Inovasi Produk

Alan tak hanya menjual lidah buaya dalam bentuk mentah, tetapi juga mengembangkan produk olahan dalam bentuk minuman sehat yang memadukan lidah buaya dengan daun stevia, pemanis alami nol kalori.

Produk yang cocok untuk penderita diabetes tersebut mulai dipasarkan lokal di warung kecil sekitar Gunung Kidul pada tahun 2016 setelah diuji coba di tahun 2014-2015, kini sudah menyebar di luar wilayah.

Tak hanya inovasi produk saja, Alan juga mulai mengembangkan destinasi wisata edukasi bernama Aloe Land. Di sini, pengunjung tak hanya menikmati budidaya tetapi juga belajar budidaya hingga

pengolahan lidah buaya ini.

Aloe Land juga menjadi sumber penghasilan warga sekitar dengan menjadi *tour guide* selama 2 jam, daripada menjadi buruh tani dengan penghasilan hanya Rp 90 ribu.

## Peluang Besar

Bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia budidaya pertanian, Alan merekomendasikan lidah buaya untuk digeluti.

"Lidah buaya ini mudah dirawat, cukup ganti pupuk setiap 4-5 bulan sekali dan penyiraman hanya dilakukan 4 hari sekali. Tapi, perhatikan genangan airnya saat musim hujan, karena itu merusak tanaman," jelasnya.

Hitung-hitungan Alan, dengan produktivitas 2,5 ton per hektar per bulan, lidah buaya menawarkan penghasilan yang menjanjikan.

"Harga jualnya berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per kilogram. Setelah dikurangi biaya perawatan sekitar Rp5 juta per hektar, petani bisa meraup keuntungan bersih sekitar Rp7,5 juta per bulan," urainya.

Kini, Alan berharap semakin banyak generasi muda yang mau mengikuti jejaknya. "Inovasi kecil bisa berdampak besar jika dikelola dengan baik," tandasnya. **Gsh**

## AGRITIPS

### Pemanfaatan Limbah Lidah Buaya sebagai Pupuk Alami

Lidah buaya bukan hanya dikenal sebagai tanaman serbaguna dalam dunia kecantikan dan kesehatan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam bidang pertanian.

Salah satu pemanfaatan unik dari lidah buaya adalah pengolahan limbahnya, seperti kulit dan sisa gel, menjadi pupuk alami yang bermanfaat bagi tanaman. Sayangnya, limbah ini sering kali terbuang sia-sia, padahal kandungan nutrisinya sangat baik untuk kesuburan tanah.

Limbah lidah buaya mengandung nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta senyawa organik lain yang membantu memperbaiki struktur tanah.

Untuk mengolahnya menjadi pupuk cair, limbah lidah buaya dapat dihancurkan menggunakan blender, lalu dicampur dengan air dan dibiarkan melalui proses fermentasi selama beberapa hari.

Larutan ini kemudian disaring dan bisa langsung digunakan untuk menyiram tanaman. Selain itu, limbah lidah buaya juga dapat dicampurkan dengan sisa

organik lain seperti daun kering atau sisa sayuran untuk dijadikan kompos. Setelah melalui proses pembusukan selama beberapa minggu, kompos ini bisa digunakan untuk memperkaya tanah.

Manfaat pupuk dari limbah lidah buaya tidak hanya terlihat pada pertumbuhan tanaman yang lebih subur dan sehat, tetapi juga pada pengurangan ketergantungan terhadap pupuk kimia. Hal ini memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi risiko pencemaran tanah dan air akibat bahan kimia.

Dengan memanfaatkan limbah lidah buaya sebagai pupuk alami, kita tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini menjadi bagian dari solusi berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung praktik pertanian hijau. **Gsh**

**PUPUK ORGANIK CAIR**

HEMAT BIAYA  
PANEN BERLIPAT  
GANDA

TEKNOLOGI FERMENTASI BAHAN ORGANIK BERMANFAAT UNTUK:

- Memperbaiki sifat biologis, fisik dan kimia tanah.
- Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi
- Memfermentasikan bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah.
- Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik dalam tanah.
- Meningkatkan Fixasi Nitrogen/Bintil akar.
- Dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan pestisida.
- Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman dan tanah.
- Pembuatan pestisida organik
- Pembuatan kompos bokashi.

L958/HAYATI/DEPTAN-PPVTPP/VIII/2011

**Kadar Hara Pupuk**

C organik = 27,05 % ; pH = 3,90 ;  
 N = 0,07 % ; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> = 3,22 ppm;  
 K<sub>2</sub>O = 7675,0 ppm; Ca = 1676,25;  
 Mg = 597,0 ppm; B < 20 ppm;  
 Cu < 0,01 ppm; Mn = 3,29 ppm;  
 Fe = 5,54 ppm; Zn = 1,90 ppm;

**Mikroba:**

Lactobacillus = 8,7 x 10<sup>5</sup> sel/ml;  
 Pelarut Fosfat = 7,5 x 10<sup>6</sup> sel/ml;  
 Yeast/Khamir = 8,5 x 10<sup>6</sup> sel/ml;

Diproduksi dan Dipasarkan  
PT. SONGGOLANGIT PERSADA

**KANTOR PEMASARAN :**  
**JAKARTA & SUMATERA :** Telp. (021) 78833766 & 78834091 Fax : (021) 78833766  
 E-mail : agoes\_em4@yahoo.com, slpjakarta@em4-indonesia.com  
**JAWA TENGAH :** Telp & Fax : (0293) 326593 E-mail : slpjateng@em4-indonesia.com  
**JAWA TIMUR :** Telp & Fax : (031) 7405203 E-mail : slpjatim@em4-indonesia.com  
**BALI :** Telp & Fax : (0361) 8424066 E-mail : slpbali@em4-indonesia.com

Web: [www.em4-indonesia.com](http://www.em4-indonesia.com)  
 Email : [bokashiok@yahoo.com](mailto:bokashiok@yahoo.com)

ADVANCED TECHNOLOGY TOWARDS NATURE FARMING

**RHINOCEROS**

DILENGKAPI DENGAN  
**PTO SHAFT**  
UNTUK DISAMBUNGAN  
PADA IMPLEMENT, FERTILIZER  
SPREADER, SPRAYER, DLL.

**R-1000HZL**

*Angsa*  
Alat ANGkut SerbAguna  
yang sudah disesuaikan  
dengan lahan perkebunan sawit

dipasarkan oleh : **PT RUTAN** [www.rutan.co.id](http://www.rutan.co.id) CUSTOMER CALL: PT RUTAN  
0811 3225 9900

**SinarTani**  
PERTANIAN INDONESIA BARU

**PRICE LIST BERLANGGANAN**

**SINAR TANI CETAK**  
**RP. 16.000** | RP 64.000/BLN  
RP 768.000/THN  
Per Edisi  
Minimum Pembelian

**SINAR TANI EPAPER**  
Rp. 72.000/ Thn

**CONTACT**  
081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)  
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)  
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)  
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)

**SINTA TV**

**SinarTani**  
Era Baru, Benyaluran Pupuk Subsidi

**SinarTani**  
PANGKALAN BANGSA

**SinarTani**  
PR Pemerintah Baru

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Whatsapp : .....  
Email : .....  
Jabatan : .....

No rek : 127.0096.016.587  
Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

[sinartani.co.id](http://sinartani.co.id) [tabloidsinartani.com](http://tabloidsinartani.com) @SinarTaniST [tabloidsinartani](http://tabloidsinartani) SINTA TV SINTA TV

# Padi Biosalin Solusi Bertani di Pesisir Pantai

Padi biosalin Semarang menawarkan solusi cerdas untuk melawan rob dan perubahan iklim. Dengan inovasi pertanian berkelanjutan, lahan salin kini bisa menjadi sumber pangan dan energi yang ramah lingkungan.



Semarang, sebuah kota yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah, kini menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim, abrasi, rob, dan salinisasi yang mengancam lahan pertanian. Namun, di balik tantangan tersebut, muncul sebuah solusi inovatif yang tak hanya menjawab masalah ketahanan pangan, tapi juga energi terbarukan pengembangan lahan salin.

Penelitian terbaru yang dipimpin Dr. Tri Martini Patria, Peneliti Ahli Utama

di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memberikan harapan baru. Dengan menggunakan metode *Life Cycle Assessment* (LCA), para peneliti mampu mengungkap potensi besar lahan salin, khususnya di kawasan Mangkang Kulon, Semarang, untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian yang berkelanjutan.

LCA adalah metode yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan suatu produk atau sistem selama siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan,

hingga pengelolaan limbah. Dalam penelitian ini, Tri Martini dan timnya memfokuskan pada padi biosalin, sebuah varietas padi yang mampu bertahan di lahan dengan kadar garam tinggi.

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa padi biosalin dapat tumbuh subur di lahan salin, bahkan mampu menghasilkan padi dengan kualitas yang memadai," tuturnya. Hasil ini menjadi angin segar bagi para petani yang selama ini terhambat kondisi tanah yang terkontaminasi garam.

Selain itu, lahan salin juga berpotensi menjadi sumber energi terbarukan. Biomassa yang dihasilkan dari residu pertanian dan rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi. "Dengan menggunakan biomassa ini, kita tidak hanya bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan," katanya.

Tak hanya menguntungkan dalam sektor pangan dan energi, pengembangan lahan salin juga terbukti lebih ramah lingkungan. Berdasarkan analisis LCA, pengembangan lahan salin secara terintegrasi memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan pertanian konvensional di lahan non-salin. "Artinya, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, penggunaan pupuk, dan kebutuhan air, yang semuanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan," jelasnya.

## Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan tersebut Tri Martini Patria merekomendasikan beberapa langkah strategis yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta. Penguatan kebijakan lokal menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung pemanfaatan

lahan salin untuk produksi pangan dan energi secara berkelanjutan. Hal ini termasuk memberikan insentif bagi petani dan investor yang berpartisipasi dalam pengembangan lahan salin.

Langkah kedua adalah penyediaan infrastruktur pendukung. Investasi dalam infrastruktur yang tepat, seperti sistem irigasi yang tahan terhadap salinitas, teknologi mitigasi salinitas, dan fasilitas pengolahan biomassa, sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pengembangan lahan salin.

Peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah ketiga yang krusial. Program pelatihan dan transfer teknologi berbasis LCA kepada masyarakat pesisir akan membantu mereka mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang ada.

Langkah terakhir adalah penelitian dan pengembangan lanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan varietas padi biosalin, teknik budidaya rumput laut, serta teknologi konversi biomassa menjadi energi. Dengan inovasi yang terus berkembang, potensi lahan salin dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk ketahanan pangan dan energi yang lebih berkelanjutan.

Pengembangan lahan salin dengan pendekatan LCA diharapkan akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Tidak hanya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan energi di Kota Semarang, tetapi juga berpotensi menjadi model percontohan bagi kawasan pesisir lainnya di Indonesia.

Dengan demikian, pengembangan lahan salin ini bukan hanya solusi lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang lebih luas, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta berkontribusi pada upaya global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. **Gsh/Yul**

## Varietas Unggul Padi Biosalin

**Biosalin varietas padi unggul untuk kawasan pesisir**

Kementerian Pertanian (Kementan) mengembangkan varietas padi unggul Biosalin untuk kawasan pesisir yang lahannya memiliki kandungan garam atau salinitas. Varietas tersebut telah dilepas dan ditanam di sejumlah daerah di Indonesia.

**Seputar Biosalin**

Terdapat 2 jenis, Biosalin 1 Agritan dan Biosalin 2 Agritan.

Dikembangkan Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Kementan dan dilepas pada 2020.

Biosalin 1 Agritan	Potensi hasil	Produktivitas rata-rata
	8,75	7,16

1. Padi Biosalin 1 Agritan, selain tahan salinitas, juga berumur sedang, agak tahan terhadap wereng batang cokelat, hawar daun bakteri dan blas, serta memiliki mutu beras yang baik dengan tekstur nasi pulen. Padi ini memiliki potensi hasil 8,75 ton/hektar dengan rata-rata hasil di sawah dengan cekaman salinitas berkisar 7,16 ton/hektar.
2. Biosalin 2 Agritan memiliki produktivitas lebih unggul, yakni potensi hasil 9,06 ton/hektar dengan rata-rata hasil 7,62 ton/hektar. Sama seperti Biosalin 1, Biosalin 2 juga berumur genjah, toleran terhadap cekaman salinitas, bereaksi moderat terhadap virus tungro, agak tahan terhadap wereng batang cokelat dan hawar daun bakteri, tahan blas, serta memiliki mutu beras yang baik dengan tekstur nasi sedang. **sumber BSIP Kementan**

# Mendag Ajak Sinar Tani Dorong Ekspor Produk Pertanian

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengajak Tabloid Sinar Tani ikut mendorong ekspor produk pertanian. Palsanya, selama ini banyak produk pertanian yang gagal masuk ke pasar ekspor karena terkendala masalah teknis, khususnya kualitas produk tidak sesuai permintaan pasar.



Dipimpin Pimpinan Perusahaan Tabloid Sinar Tani, Mulyono Machmur bertemu dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso di ruang kerjanya Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (8/1) menjadi sebuah penghargaan tersendiri bagi Tabloid Sinar Tani. Jika selama ini Tabloid yang kelahirannya di Kementerian Pertanian memang lebih banyak membahas soal pertanian.

Namun dengan perkembangan media massa, Tabloid Sinar Tani pun terus melakukan terobosan dengan menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintah di luar Kementerian Pertanian. Tahun ini, salah satunya adalah Kementerian Perdagangan.

Pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, M Rivai Abbas; Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Krisna Ariza; dan Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Arief Wibisono.

Banyak hal yang dibahas, termasuk pengalaman saat bertemu Mendag Budi Santoso yang sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan mengajak Sinar Tani mendorong ekspor produk pertanian. "Kita punya perwakilan di beberapa negara. Bahkan ada atase perdagangan di sekitar 33 negara dunia," kata Budi yang pernah bertugas sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei (September 2020–Desember 2022).

Selama ini Budi mengungkapkan, pihaknya mempunyai forum tersendiri yakni UMKM Bisa Ekspor termasuk produk pertanian. Dengan forum tersebut, jika Tabloid Sinar Tani mempunyai komunitas UMKM yang siap atau bisa ekspor, maka bisa ikut dalam business matching.

"Kami siap bantu ikut dalam

forum tersebut dan setiap bulan kami ada business matching. Nanti UMKM mempresentasikan. Kalau importir berminta bisa langsung berkomunikasi dan kita akan dampingi," tuturnya. Saat ini lanjut Budi, sudah banyak komoditas pertanian yang dikelola UMKM bisa ekspor, seperti beras khusus pandan wangi.

## Permintaan Ekspor

Namun di sisi lain Budi mengatakan, meski banyak komoditas pertanian yang diminati pasar ekspor, sayangnya kualitasnya belum mampu memenuhi permintaan pasar. Misalnya, buah manggis Indonesia yang sulit masuk pasar Taiwan, padahal manggis Thailand bisa masuk.

"Mengapa ini terjadi? Dengan berbagai penanganan dan melalui beberapa proses, manggis asal Thailand bisa memenuhi persyaratan. Kalau kita kan petani tidak bisa melakukan penanganan seperti itu, karena untuk membeli alatnya mahal. Jadi kita dianggap tidak profesional," katanya.

Begitu juga, durian asal Indonesia yang juga sulit masuk ke pasar China. Pemerintah China menetapkan beberapa persyaratan dan protokol bagi komoditas pertanian dari luar negeri yang akan masuk ke negara mereka. "Protokol ini mereka buat karena untuk memastikan dari petani hingga pasar aman bagi konsumen," katanya.

Contoh lainnya adalah salak. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak jenis salak. Dengan permintaan dari luar negeri sangat besar, seperti Taiwan, tapi salak Indonesia sulit masuk. Selain itu pisang Indonesia juga banyak permintaan di China. "Karena dikelola secara profesional oleh salah satu perusahaan, ternyata mudah masuk," ujarnya.

Jadi, kuncinya adalah harus ada investasi dalam proses penanganan produk yang akan diekspor. Selama ini negara lain bisa memenuhi permintaan pasar, petani Indonesia belum bisa. "Sekarang ini keunggulannya adalah kompetitif, bukan komparatif," ujarnya.

Sebenarnya kata Budi, produk pertanian Indonesia bisa bersaing di pasar global. Untuk itu, pelaku usaha bisa memanfaatkan perwakilan dagang yang ada di luar negeri untuk mengetahui pasar. "Nanti, Business Matching ini bisa dimanfaatkan UMKM. Kita akan target tiap perwakilan perdagangan di luar negeri," katanya.

Budi juga menyoroti masalah penanganan paska panen di tingkat petani dan budaya konsumsi. Misalnya, komoditas cabai yang selama ini masyarakat masih terbiasa pada produk segar. Karena itu sering terjadi gejolak harga cabai. "Saat produksi turun, harga melonjak. Tapi saat panen raya, harga turun drastis," ujarnya.

Padahal menurutnya di India, masyarakatnya sudah terbiasa mengonsumsi cabai kering, bahkan untuk industri. Jika petani bisa mengolah cabai menjadi kering atau bubuk, maka berpotensi untuk menyuplai industri dan ekspor. **Yul**

## Pengalaman Kendalikan Hama Tikus

Pelajaran lain bagi petani dari Budi Santoso adalah persoalan hama tikus. Masih memiliki sawah di Sukoharjo, mantan Sekjen Kementerian Perdagangan mengaku, hama tikus sering menyerang tanaman padi.

Tikus memang menjadi salah satu hama tanaman padi yang kerap meresahkan petani. Bahkan serangannya bisa membuat kerusakan parah (puso) dan gagal panen. Berbagai cara dilakukan petani untuk menangkali hama pengerat tersebut, termasuk gropyokan dan burung hantu. Sayangnya, hasilnya kadang kurang memuaskan.

Saat menjadi Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, dirinya melihat tidak ada lahan pertanian padi yang terserang hama tikus. Budi kemudian meminta ahli

pertanian untuk mempelajari fenomena tersebut dan membuat riset. "Ternyata kesimpulan saya faktor utamanya adalah sampah," ujarnya.

Di Taipei, kata Budi, penanganan sampah, baik di lingkungan perumahan maupun lokasi pertanian cukup baik, sehingga tidak memunculkan hama tikus. Masyarakat sudah terbiasa memilah sampah, baik yang kering maupun basah. "Setiap pagi ada mobil pengangkut sampah dan kondisinya juga cukup baik," tambahnya.

Sementara di Indonesia menurut Budi, justru sampah makanan jumlahnya justru jauh lebih banyak ketimbang sampah jenis lain. Padahal sampah makanan yang mendorong datangnya hama tikus. "Saat musim tanam, tikus akan datang ke sawah. Tapi kalau tidak musim tanam padi, tikus akan datang ke rumah-rumah karena ada sampah," tuturnya. **Yul**

# Kawasan Transmigrasi Potensial Sokong Swasembada Pangan



Kawasan transmigrasi selama ini kurang dilirik sebagai sumber pangan, padahal potensinya sangat besar. Dalam upaya mendukung swasembada pangan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman menandatangani kesepakatan strategis untuk pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan di kawasan transmigrasi secara terintegrasi.

“Kita kerja sama membangun kluster, membangun episentrum ekonomi baru di desa yaitu kluster pertanian tradisional menuju pertanian modern,” kata Mentan Amran usai penandatanganan kesepakatan bersama Menteri Transmigrasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (9/1).

Mentan Amran menjelaskan, pelaksanaan program ini bersifat holistik dan melibatkan kolaborasi. Kementan akan mendukung pada penyiapan lahan kluster pertanian modern, alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, pupuk, hingga pendampingan serta peningkatan keterampilan.

“Pendekatannya harus holistik. Menteri Perumahan bangun perumahan, kami (Kementan) cetak sawah menyiapkan alsintan, sehingga petani dan transmigran lebih sejahtera dan kehidupan lebih baik,” katanya.

Untuk dukungan alat dan mesin pertanian, jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah kelompok transmigran yang mengelola lahan. Seperti Brigade Pangan, satu kelompok yang terdiri atas 15 orang akan mengelola lahan seluas 200 hektar.

“Kami siapkan lahan kluster pertanian modern. Transmigrasi kita kolaborasikan di beberapa tempat. Jumlah alsintan tergantung jumlah transmigran, satu paket untuk satu kelompok nilainya Rp3

miliar, terdiri dari traktor roda 4, traktor roda 2, combine harvester, rice transplanter, pompa air, dan seterusnya,” paparnya.

Lebih lanjut, ia berharap dengan pengembangan kawasan transmigrasi, transformasi kluster modern, serta peningkatan keterampilan transmigran, maka kesejahteraan petani dan transmigran dapat meningkat. “Ke depan kita juga melakukan hilirisasi produk-produk sehingga *added value* melompat 100-200 persen. Kata kunci ada episentrum ekonomi baru, ada kesejahteraan, sehingga orang yang bertransmigrasi merasa nyaman, pendapatannya minimal 10 juta per bulan,” ungkapnya.

Senada dengan Mentan Amran, Mentrans Iftitah mengemukakan bahwa sinergi ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi besar kawasan transmigrasi untuk menyokong produksi pangan. Hasil

identifikasi Kementerian Transmigrasi ada sekitar 30-40 persen produksi padi nasional disokong dari kawasan transmigrasi.

“Kami menemukan bahwa tanaman padi 30-40 persen dihasilkan dari kawasan transmigrasi. Kalau kita tekuni ini dengan teknologi, insya Allah meningkat dan swasembada dapat tercapai secepat-cepatnya,” katanya.

Ia mengapresiasi gerak cepat Mentan Amran dan berharap kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas pangan, tetapi dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan petani dan transmigran. “Kami berdua memiliki kesamaan visi bagaimana ke depan mengutamakan peningkatan pendapatan kesejahteraan rakyat Indonesia sehingga transmigran dan petani bisa naik kelas dan menjadi penyokong pembangunan nasional,” katanya. **Yul**

## BULOG dan SRC Teken Kontrak

Perum BULOG dan PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) memulai tahun 2025 dengan meresmikan kerja sama strategis untuk mendukung pengembangan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) dan toko kelontong dalam jaringan Sampoerna Retail Community (SRC) serta Visibilitas Produk BULOG di Toko SRC.

Peresmian kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua pihak di Kantor Wilayah BULOG Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (7/1). Acara ini dihadiri Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita, dan Direktur SRCIS, Romulus Sutanto.

Febby mengatakan, kolaborasi dengan SRCIS untuk mendukung pengembangan usaha RPK dan usaha Toko SRC dengan memberikan kesempatan bagi toko-toko kelontong tersebut untuk menjadi outlet RPK. Selain menawarkan peluang pengembangan bisnis, pihaknya percaya kesempatan ini dapat membantu memperluas cakupan distribusi produk-produk BULOG melalui Toko SRC.

Program RPK sendiri kata Febby bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pangan pokok, mulai dari beras hingga minyak goreng, dengan harga terjangkau bagi masyarakat.



Saat ini, sudah terdapat 21.000 outlet RPK yang tersebar hingga ke tingkat RT di seluruh Indonesia. “Kami berharap kerja sama dengan SRCIS ini dapat memperluas jaringan distribusi komoditi pangan BULOG melalui toko-toko kelontong anggota SRC serta meningkatkan skala bisnis RPK,” katanya.

Febby menambahkan, sebagai tahap awal, kerja sama ini akan dimulai di lingkup area Jawa Tengah dengan kemungkinan perluasan ke daerah-daerah lain di masa depan. “Harapan besar kami adalah terdistribusinya produk pangan berkualitas yang dapat menjangkau

masyarakat yang lebih luas dengan harga yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung program pemerintah untuk mencapai stabilisasi harga pangan nasional,” tuturnya.

Sementara itu Direktur SRCIS, Romulus Sutanto, mengapresiasi inisiatif Perum BULOG dalam kerja sama RPK dan Visibilitas Produk BULOG. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan visi SRCIS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia melalui penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya toko kelontong.

Romulus meyakini kerjasama ini

semakin menegaskan posisi SRC sebagai salah satu pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Selama lebih dari 16 tahun, SRCIS telah secara konsisten menjalankan program pembinaan dan pengembangan UMKM toko kelontong secara konsisten melalui program SRC.

Kini, SRC telah berkembang hingga mencapai lebih dari 250.000 toko kelontong yang tergabung dalam 8.200 Paguyuban SRC dan aktif bermitra dengan 6.300 toko grosir Mitra SRC. Tak hanya itu, SRC juga telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Hal ini ditunjukkan dalam hasil riset Kompas Gramedia (KG) Media pada tahun 2023 yang memperkirakan bahwa omset Toko SRC secara keseluruhan pada tahun 2022 mencapai Rp236 triliun atau setara dengan 11,4% Produk Domestik Bruto (PDB) Retail Nasional 2022.

Ia berharap Program RPK dan Visibilitas Produk BULOG akan semakin mendukung kontribusi Toko SRC bagi masyarakat. “Kedua program tersebut selaras dengan semangat Toko SRC sebagai Solusi Belanja Harian yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap kerja sama ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan pokok,” kata Romulus.



# Fadry Djufry

## Tetap Fokus

# Kawal Swasembada Pangan

Menjelang pelantikan Gubernur seluruh Indonesia hasil Pilkada serentak beberapa waktu lalu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, Fadry Djufry dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan.

**M**enteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (7/1) di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta melantik Fadry menggantikan Zudan Arif Fakrulloh. Usai pelantikan, Fadry menjelaskan dirinya akan fokus pada program swasembada pangan yang kini menjadi perhatian utama Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional diharapkan bisa menjadi contoh untuk provinsi lain dalam ketersediaan pangan Indonesia," ungkapnya.

Fadry pun siap menjembatani dan mengakselerasi program nasional di provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan pihaknya siap mengawal dan mensinergikan berbagai program pembangunan pertanian yang telah digagas Kementerian Pertanian, seperti optimalisasi lahan rawa dan perbaikan irigasi sekunder dan tersier. "Ini untuk meningkatkan produktivitas padi nasional, diharapkan Sulawesi Selatan bisa

berkontribusi dalam hal penyediaan beras di Indonesia," tuturnya.

Fadry Djufry lahir di Makassar pada 14 Maret 1969. Ia memperoleh gelar Sarjana Pertanian (S1) tahun 1993 pada bidang studi Agronomi Universitas Hasanuddin, Makassar. Kemudian ia meneruskan pendidikan S2 bidang studi Agroklimat dan S3 bidang Pemodelan Tanaman di Institut Pertanian Bogor, masing-masing selesai pada tahun 2000 dan 2005.

Melihat perjalanan karirnya, Fadry mengawali kerja di Kementerian Pertanian sebagai peneliti pada Tahun 1994. Awalnya sebagai Kepala Rumah Tangga dan Perlengkapan Sub Balai Penelitian Hortikultura Jeneponto Sulsel (1994-1995), kemudian sebagai Kepala Program dan Kerjasama Sub Balai Penelitian Hortikultura Jeneponto Sulsel (1995-1996).

Fadry juga pernah menjadi Sekretaris Proyek SADP dan Peneliti BPTP Sulawesi Tenggara (1995-1997). Pada tahun 2005-2007, Fadry diamanahkan menjadi Koordinator Program pada BPTP Kalimantan

Selatan, lalu Koordinator Program pada LPTP Sulawesi Barat (2008), Kepala BPTP Papua (2008-2012) dan dipindah menjadi Kepala BPTP Sulawesi Selatan (2012-2015).

Sebelum menjadi Kepala BSIP, Fadry sempat menjadi Kepala Puslitbangbun (2015-2019). Putra Makassar ini merupakan Peneliti Utama bidang Budidaya dan Produksi Tanaman di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun).

Sejak Februari 2019 hingga Januari 2022, Fadry menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Kemudian pada 25 Januari 2022, Fadry dikukuhkan sebagai Profesor Riset ke 630 lingkup nasional dan ke 159 lingkup Kementerian Pertanian. Orasi Profesor Risetnya berjudul 'Pengembangan Pertanian Cerdas Iklim Inovatif Berbasis Teknologi Budidaya Adaptif Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan'.

Selain jabatan struktural di lingkup Balitbangtan, Fadry juga berkecimpung di dunia akademisi sebagai Dosen Pasca Sarjana (S2) pada Universitas Islam Makassar (2012-2015), Dosen Pasca Sarjana (S2) pada Universitas Hasanuddin Makassar (2012-2015), Dosen Pasca Sarjana (S2) pada Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (2005-2007). Penghargaan yang

pernah diterima Satya Lancana Karya Satya XX Tahun yang diperoleh pada penyematan tanggal 17 Agustus 2019.

Kiprah Fadry juga telah diakui di dunia internasional. Fadry terpilih sebagai anggota dari *The International Scientific Advisory Board for Strategy "MeaDRI"*, dewan penasihat independen yang terdiri dari ilmuwan terkemuka dan pejabat eksekutif dari lembaga/universitas pertanian terkemuka dunia. "MeaDRI" adalah strategi sistem pangan berkelanjutan yang digagas dan diluncurkan oleh Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF) Jepang.

### Pesan Mendagri

Mendagri menyampaikan banyak program pemerintah yang perlu didorong secara cepat dan berkelanjutan, seperti program swasembada pangan, makan bergizi, pengentasan stunting dan hilirisasi. "Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan di Indonesia, dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Pak Fadry di bidang pertanian, diharapkan bisa mempercepat program-program swasembada dan menunjang pangan Indonesia," katanya.

Mendagri juga meminta agar Pj Gubernur yang telah dilantik agar segera berkomunikasi dengan seluruh stakeholder di Sulawesi Selatan untuk mengakselerasi Pembangunan di masa transisi.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ali Jamil yang hadir mewakili Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa keluarga besar Kementerian Pertanian bangga dengan penunjukan salah satu putra terbaiknya menjadi Penjabat Gubernur Sulsel. Ali Jamil juga berharap bahwa Sulsel sebagai provinsi penghasil beras terbesar keempat di Indonesia dapat terus berkontribusi sebagai penghasil pangan di wilayah Indonesia timur.

"Kementerian Pertanian siap mendukung provinsi Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi beras nasional, potensi yang besar itu dapat kita gerakan bersama-sama antara Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, serta para bupati di seluruh Sulawesi Selatan," tambahnya. **Yul**

